



Laporan Perekonomian Provinsi Aceh

FEBRUARI 2025

KPw BI Provinsi Aceh

VISI

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia Maju.

MISI

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Kalender Publikasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Aceh

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Mei	Agustus	November	Februari

Penerbit :

Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh - Indonesia

Telp : 0651-33200 / Fax : 0651-34116

Publikasi LPP secara online dapat diperoleh di:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/aceh/Default.aspx>

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga buku “Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Februari 2025” ini dapat dipublikasikan. Buku ini memaparkan informasi mengenai perkembangan beberapa indikator perekonomian daerah, diantaranya pertumbuhan ekonomi, perbankan, sistem pembayaran dan keuangan daerah yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan informasi baik untuk internal maupun eksternal Bank Indonesia. Secara umum, ringkasan hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Aceh periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Aceh pada triwulan IV 2024 tumbuh 4,15% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,17% (yoy) Angka pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tercatat tumbuh sebesar 4,60% (yoy), maupun angka pertumbuhan nasional sebesar 4,95% (yoy). Melambatnya angka pertumbuhan tersebut tercermin pada melambatnya beberapa Lapangan Usaha (LU) utama di Provinsi Aceh seperti LU Perdagangan Besar, LU Konstruksi, dan LU Industri Pengolahan..
2. Inflasi Provinsi Aceh pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 2,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 1,50% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi Provinsi Aceh pada triwulan IV 2024, terutama bersumber dari inflasi komoditas perikanan yang meningkat di tengah cuaca buruk pada akhir tahun serta komoditas pangan lain (daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) akibat penurunan pasokan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025. Namun demikian, capaian inflasi Aceh masih sesuai dengan sasaran target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.
3. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,8%-4,2% (yoy) atau melambat dibandingkan angka tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pada ekonomi global, terutama dari risiko eskalasi perang dagang akibat kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat, serta tingginya potensi konflik geopolitik berkelanjutan. Kendati demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global pada kisaran 4,6-5,8% (yoy).
4. Sementara itu, laju inflasi tahun 2025 diperkirakan berada kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Prospek terkendalinya inflasi Provinsi Aceh pada tahun 2025 didukung oleh berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID se-Aceh.

Dalam kesempatan ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Harapan kami, kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa kualitas dan informasi yang disajikan masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan buku ini.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, Februari 2025
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Agus Chusaini
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1. GAMBARAN UMUM	2
1.2. SISI PERMINTAAN	3
1.3. SISI LAPANGAN USAHA.....	6
BAB 2. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	14
2.1. GAMBARAN UMUM	15
2.2. PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	15
2.3. BELANJA DAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT	16
BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	19
3.1. PERKEMBANGAN UMUM INFLASI	20
3.2. ANALISIS PERKEMBANGAN INFLASI	20
3.3. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN I 2025	24
3.4. INFLASI SPASIAL.....	25
3.5. AKTIVITAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) ACEH.....	26
BAB 4. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM	28
4.1. KONDISI UMUM	29
4.2. INTERMEDIASI PERBANKAN.....	30
4.3. STRATEGI DALAM MENDORONG PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI ACEH	33
BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	35
5.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	36
5.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI	36
5.3. KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)	39
5.4. PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DAN PKH	40
BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN.....	42
6.1. KETENAGAKERJAAN	43
6.2. KEMISKINAN	45
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	47
7.1. PROSPEK MAKROEKONOMI	48
7.2. PROSPEK INFLASI	50
7.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN	50
DAFTAR ISTILAH	54

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2024	2
Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi	3
Grafik 1.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi Permintaan Triwulan IV 2024	3
Grafik 1.4 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	3
Grafik 1.5 Perkembangan Penjualan Kendaraan	4
Grafik 1.6 Perkembangan Pembiayaan Konsumsi	4
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	4
Grafik 1.8 Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan	4
Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi APBD	5
Grafik 1.10 Pertumbuhan PMTB	5
Grafik 1.11 Perkembangan Pembiayaan Investasi	5
Grafik 1.12 Pertumbuhan Ekspor Barang & Jasa	5
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara	6
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh	6
Grafik 1.15 Pertumbuhan Impor Barang & Jasa	6
Grafik 1.16 Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri	6
Grafik 1.17 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan IV 2024	7
Grafik 1.18 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian	7
Grafik 1.19 Perkembangan Produksi Padi	7
Grafik 1.20 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	8
Grafik 1.21 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan	8
Grafik 1.22 Perkembangan Penjualan Kendaraan	8
Grafik 1.23 Perkembangan Margin Berdasarkan Skala <i>Likert</i> Survei <i>Liaison</i> Perusahaan Industri Perdagangan	8
Grafik 1.24 Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan	9
Grafik 1.25 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	9
Grafik 1.26 Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi	9
Grafik 1.27 Perkembangan Pengadaan Semen	9
Grafik 1.28 Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan	10
Grafik 1.29 Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan	10
Grafik 1.30 Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan	10
Grafik 1.31 Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda	10
Grafik 1.32 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
Grafik 1.33 Perkembangan Penggunaan Listrik Industri	11
Grafik 1.34 Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan	11
Grafik 1.35 Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin	11
Grafik 1.36 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	12
Grafik 1.37 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar	12
Grafik 2.1 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh	16
Grafik 3.1 Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2024	20

Grafik 3.2 Sasaran Produksi Komoditas Cabai Merah Tahun 2024 (ton).....	21
Grafik 3.3 Perkembangan Harga Emas Dunia	24
Grafik 3.4 Perkembangan Survei Konsumen	24
Grafik 3.5 Pergerakan Inflasi Kab/Kota IHK di Aceh (% , yoy).....	25
Grafik 4.1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank).....	29
Grafik 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga	29
Grafik 4.3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)	29
Grafik 4.4 Perkembangan <i>Non-Performing Financing</i> (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Proyek)	30
Grafik 4.7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank).....	30
Grafik 4.8 Perkembangan DPK berdasarkan Jenis.....	31
Grafik 4.9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan.....	31
Grafik 4.10 Perkembangan DPK Perseorangan	31
Grafik 4.11 Perkembangan DPK Pemerintah.....	31
Grafik 4.12 Perkembangan DPK Korporasi	32
Grafik 4.13 Perkembangan Pembiayaan (Lokasi Proyek).....	32
Grafik 4.14 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Penggunaan.....	32
Grafik 4.15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha	33
Grafik 4.16 Perkembangan Pembiayaan UMKM	33
Grafik 5.1 <i>Netflow</i> Kas (Rp Triliun)	36
Grafik 5.2 Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	36
Grafik 5.3 Temuan Uang Palsu	36
Grafik 5.4 Perkembangan Nominal SKNBI	37
Grafik 5.5 Perkembangan Volume SKNBI	37
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal BI-RTGS	37
Grafik 5.7 Perkembangan Volume BI-RTGS	37
Grafik 5.8 Transaksi ATM Debit	37
Grafik 5.9 Transaksi Kartu Kredit	38
Grafik 5.10 Perkembangan Transaksi UE	38
Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS	39
Grafik 5.12 Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS	39
Grafik 5.13 Transaksi KUPVA BB	39
Grafik 5.14 Disagregasi Transaksi UKA	40
Grafik 5.15 Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)	41
Grafik 5.16 Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)	41
Grafik 5.17 Perkembangan Program Sembako (Nominal)	41
Grafik 5.18 Perkembangan Program Sembako (KPM)	41
Grafik 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera	43
Grafik 6.2 Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota	45
Grafik 6.3 Penduduk Miskin Provinsi di Wilayah Sumatera	45
Grafik 6.4 Perkembangan Rasio Gini di Aceh	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2024.....	15
Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan APBD se-Provinsi Aceh Triwulan IV 2024.....	16
Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2024.....	16
Tabel 2.4 Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2024.....	17
Tabel 2.5 Data Realisasi APBD Provinsi Aceh Triwulan III 2024.....	18
Tabel 2.6 Data Realisasi APBN di Provinsi Aceh Triwulan III 2024.....	18
Tabel 3.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa.....	20
Tabel 3.2 Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.....	20
Tabel 3.3 Inflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki.....	21
Tabel 3.4 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar.....	21
Tabel 3.5 Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga.....	22
Tabel 3.6 Inflasi Kelompok Kesehatan.....	22
Tabel 3.7 Inflasi Kelompok Transportasi.....	22
Tabel 3.8 Inflasi Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Keuangan.....	23
Tabel 3.9 Inflasi Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.....	23
Tabel 3.10 Inflasi Kelompok Pendidikan.....	23
Tabel 3.11 Inflasi Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.....	23
Tabel 3.12 Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.....	24
Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh.....	25
Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe.....	26
Tabel 3.15 Andil Inflasi di Kota Meulaboh.....	26
Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang.....	26
Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah.....	26
Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	43
Tabel 6.2 Perkembangan TPT.....	43
Tabel 6.3 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor.....	43
Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Pendidikan.....	44
Tabel 6.5 Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan.....	44
Tabel 6.6 Nilai Tukar Petani.....	44
Tabel 6.7 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan.....	46
Tabel 6.8 Indeks Kemiskinan.....	46
Tabel 7.1 <i>Global Economic Growth Outlook</i>	48

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

A. PDRB

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)

Sektoral (Rp Triliun)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,80	10,19	10,03	11,61	10,49	9,83	10,07	11,74
Pertambangan dan Penggalian	2,47	2,57	2,72	2,57	2,62	3,01	2,91	2,95
Industri Pengolahan	1,49	1,60	1,61	1,67	1,56	1,62	1,66	1,71
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Konstruksi	3,15	3,20	3,56	4,11	3,27	3,47	3,78	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,74	5,56	5,69	6,27	5,83	5,84	5,92	6,27
Transportasi dan Pergudangan	2,34	2,49	2,47	2,43	2,59	2,88	2,95	2,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53	0,55	0,56	0,59	0,55	0,55	0,59	0,59
Informasi dan Komunikasi	1,63	1,63	1,62	1,63	1,64	1,65	1,70	1,64
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,56	0,37	0,37	0,57	0,56	0,57	0,59	0,57
Real Estate	1,48	1,48	1,62	1,52	1,56	1,56	1,62	1,59
Jasa Perusahaan	0,23	0,22	0,23	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,78	3,25	3,13	3,25	3,03	3,48	3,33	3,49
Jasa Pendidikan	0,97	1,03	0,97	0,94	0,99	1,04	1,04	1,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,20	1,26	1,33	1,21	1,13	1,28	1,38	1,33
Jasa lainnya	0,57	0,61	0,62	0,55	0,57	0,63	0,64	0,60
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (% , yoy)

Sektoral Growth (% , yoy)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,75%	5,66%	7,70%	8,54%	7,04%	-3,55%	0,38%	1,11%
Pertambangan dan Penggalian	-6,21%	-5,28%	-1,82%	-6,10%	5,90%	17,24%	6,86%	14,68%
Industri Pengolahan	4,40%	-4,90%	-2,89%	-1,97%	4,69%	1,50%	2,92%	2,81%
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	4,92%	7,46%	7,94%	8,85%	9,22%	4,86%	4,49%	3,93%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78%	4,84%	5,31%	2,00%	6,44%	0,31%	0,89%	0,25%
Konstruksi	3,60%	7,84%	1,36%	2,65%	3,90%	8,54%	6,02%	0,05%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,72%	5,53%	9,68%	10,23%	1,68%	4,91%	3,96%	-0,02%
Transportasi dan Pergudangan	3,77%	10,41%	9,47%	6,27%	10,65%	15,69%	19,46%	21,12%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,32%	7,09%	5,38%	9,16%	3,76%	0,97%	6,36%	0,34%
Informasi dan Komunikasi	11,08%	8,01%	0,18%	0,90%	0,45%	1,13%	5,36%	0,50%
Jasa Keuangan dan Asuransi	-6,89%	-17,30%	-26,95%	5,14%	-0,35%	52,01%	58,69%	0,29%
Real Estate	4,06%	3,89%	2,09%	4,72%	5,09%	4,95%	0,10%	4,32%
Jasa Perusahaan	4,07%	-5,62%	-2,31%	-0,02%	2,79%	6,77%	7,38%	0,54%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,66%	6,81%	-5,78%	-0,39%	9,08%	7,17%	6,39%	7,48%
Jasa Pendidikan	2,18%	7,76%	6,76%	-8,47%	1,72%	1,65%	6,76%	7,71%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,58%	-2,02%	8,69%	-3,48%	-5,74%	1,39%	3,70%	9,40%
Jasa lainnya	5,75%	9,14%	8,49%	-0,81%	0,25%	3,10%	4,09%	9,12%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran (Rp Triliun)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	19,43	19,98	19,99	20,03	20,39	20,83	20,76	20,89
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	0,67	0,67	0,67	0,83	0,87	0,75	0,80	0,89
- Konsumsi Pemerintah	3,39	5,91	5,83	7,17	4,15	6,36	6,19	8,10
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	11,49	11,73	12,01	12,32	11,58	12,49	12,82	13,09
- Perubahan Inventori	0,37	-0,34	0,42	-0,16	0,32	-0,12	0,13	-0,11
- Ekspor Luar Negeri	2,06	1,60	1,24	1,34	18,05	18,21	21,61	23,73
- Impor Luar Negeri	0,33	0,13	0,30	0,69	18,66	20,78	23,81	25,75
PDRB	35,01	36,09	36,61	39,23	36,70	37,72	38,50	40,85

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Pengeluaran (% , yoy)

Komponen (Rp Triliun)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
- Konsumsi Rumah Tangga	3,14%	3,31%	4,06%	5,80%	4,93%	4,24%	3,85%	4,32%
- Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga	5,14%	4,81%	0,59%	21,88%	29,34%	10,67%	18,95%	7,51%
- Konsumsi Pemerintah	0,86%	10,19%	1,41%	-8,70%	21,10%	6,89%	5,36%	12,44%
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,52%	7,82%	5,46%	4,76%	0,77%	6,36%	5,95%	5,49%
- Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ekspor Luar Negeri	-0,32%	12,31%	18,02%	17,75%	10,14%	-3,74%	7,68%	11,31%
- Impor Luar Negeri	-0,52%	12,35%	19,41%	12,71%	11,59%	-0,37%	5,75%	14,91%
PDRB	4,64%	4,37%	3,78%	4,15%	4,82%	4,54%	5,17%	4,15%

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

B. Inflasi

Inflasi ⁴ (% , yoy)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Banda Aceh	5,32	2,70	1,40	1,53	2,52	2,07	1,84	2,16
Lhokseumawe	5,35	2,69	2,55	1,56	2,79	2,97	2,11	2,79
Meulaboh	6,27	2,69	2,10	1,42	4,39	3,94	2,40	3,29
Aceh Tamiang					3,38	3,14	0,99	1,77
Aceh Tengah					4,51	4,78	0,47	1,63
Provinsi Aceh	5,46	2,70	1,83	1,53	3,25	3,09	1,50	2,17

Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

C. Perbankan

Indikator Umum

Indikator	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset (Rp Triliun)	51,04	52,03	53,77	57,84	56,03	57,67	59,99	60,71
Pertumbuhan (yoy)%	2,35	-1,66	2,26	8,68	9,78	10,85	11,57	10,53
DPK (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92
Kredit/Pembiayaan (Rp Triliun)	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98
Pertumbuhan (yoy)%	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,02
FDR %	90,87	92,90	94,02	92,00	94,38	94,14	95,14	96,32
NPF-gross %	1,82	1,96	1,80	1,57	1,68	1,61	1,64	1,79
NPF-Nominal (Rp Triliun)	0,64	0,71	0,67	0,61	0,66	0,66	0,70	0,78

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

⁴ SBH 2022

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)/Simpanan

Simpanan	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total (Rp Triliun)	38,98	38,86	39,87	41,93	41,39	43,35	44,70	45,67
Pertumbuhan (yoy)%	1,34	-5,47	0,41	5,78	6,18	11,56	12,11	8,92
Giro (Rp Triliun)	6,90	6,73	8,19	5,70	7,92	8,81	10,51	6,00
Pertumbuhan (yoy)%	-34,94	-27,23	12,33	-9,66	14,71	30,85	28,41	5,15
Tabungan (Rp Triliun)	21,55	22,52	22,07	24,99	22,99	24,35	24,19	27,11
Pertumbuhan (yoy)%	6,27	4,97	3,43	4,33	6,71	8,12	9,60	8,50
Deposito (Rp Triliun)	10,53	9,61	9,62	11,24	10,48	10,19	10,00	12,56
Pertumbuhan (yoy)%	38,94	-7,63	-13,23	19,87	-0,47	6,08	3,98	11,76

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Pinjaman	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	35,42	36,1	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98
Pertumbuhan (yoy) %	10,99	10,09	12,07	12,68	10,28	13,04	13,45	14,02
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,51	66,14	6,75	6,82	6,52	7,19	7,43	7,29
Pertumbuhan (yoy)%	-	-12,79	-7,06	0,14	0,05	8,65	10,07	6,89
Investasi (Rp Triliun)	4,18	4,56	5,25	5,63	5,88	6,30	6,77	7,52
Pertumbuhan (yoy)%	52,56	53,45	59,27	55,26	40,41	38,20	28,91	33,57
Konsumsi (Rp Triliun)	14,72	24,92	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16
Pertumbuhan (yoy)%	13,25	12,1	11,33	9,77	7,87	9,60	11,15	11,63

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Pinjaman	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Kredit (Rp Triliun)	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,87
Pertumbuhan (yoy) %	2,49	2,65	5,91	1,25	0,57	1,61	2,46	4,66
Modal Kerja (Rp Triliun)	12,07	12,62	12,47	12,15	11,42	11,77	11,82	12,87
Pertumbuhan (yoy)%	-13,98	-7,61	1,84	-5,79	-5,42	-6,78	-5,22	1,98
Investasi (Rp Triliun)	9,75	9,62	10,15	9,82	8,77	8,91	9,23	9,37
Pertumbuhan (yoy)%	8,80	2,30	5,79	-4,13	-10,16	-7,43	-9,15	-8,53
Konsumsi (Rp Triliun)	26,55	16,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,38
Pertumbuhan (yoy)%	9,69	8,49	7,93	6,83	7,03	8,83	10,29	10,74

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah

Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	1,74	1,92	2,20	2,32	2,33	3,01	3,28	3,44
Perikanan	0,30	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,31	0,30
Pertambangan	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,13	0,11
Ind, Pengolahan	1,06	1,16	1,24	1,30	1,31	1,34	1,34	1,55
Listrik, Gas & Air	0,06	0,07	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	0,51	0,58	0,62	0,62	0,54	0,57	0,54	0,52
Perdagangan	5,26	5,29	5,47	5,59	5,52	5,77	6,04	6,25
Hotel & Restoran	0,31	0,35	0,41	0,44	0,47	0,51	0,53	0,56
Transportasi, Gudang & Kom,	0,21	0,22	0,23	0,26	0,27	0,28	0,31	0,33
Perantara Keuangan	0,14	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	0,20	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,27	0,28
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,04	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,23	0,24	0,28	0,31	0,31	0,31	0,35	0,37
Jasa Kemasyarakatan	0,54	0,61	0,71	0,77	0,77	0,81	0,82	0,83
Jasa Perseorangan	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	24,72	24,93	25,48	26,12	26,67	27,32	28,32	29,16
Total	35,42	36,10	37,48	38,57	39,07	40,81	42,52	43,98

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Bank, diolah

Sektor (Rp Triliun)	2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian	2,97	3,79	4,05	4,12	4,15	4,58	4,56	4,77
Perikanan	0,30	0,30	0,30	0,30	0,32	0,32	0,31	0,31
Pertambangan	3,59	2,47	2,27	2,42	1,48	1,16	1,35	1,81
Ind, Pengolahan	3,43	4,13	3,97	3,86	4,30	4,43	4,22	3,22
Listrik, Gas & Air	0,33	0,27	0,33	0,33	0,32	0,31	0,32	0,32
Konstruksi	0,78	0,82	0,93	0,92	0,89	0,86	0,94	0,88
Perdagangan	6,67	6,66	6,85	6,34	6,27	6,48	6,72	6,88
Hotel & Restoran	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,63	0,65
Transportasi, Gudang & Kom,	0,30	0,30	0,36	0,38	0,38	0,38	0,36	0,38
Perantara Keuangan	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Perumahan, usaha sewa & Js, Perusahaan	2,10	2,01	1,92	1,52	0,26	0,27	0,29	0,30
Adm Pemerintahan,	-	-	-	-	-	-	-	-
Jasa Pendidikan	0,05	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09
Jasa Kesehatan & Keg, Sosial	0,25	0,26	0,29	0,32	0,32	0,33	0,36	0,38
Jasa Kemasyarakatan	0,56	0,62	0,73	0,78	0,78	0,82	0,84	0,85
Jasa Perseorangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Badan Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
Keg, Yg, Blm Jelas Keg-nya	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerima Kredit Bukan Lap, Usaha	26,55	26,72	27,26	27,94	28,47	29,08	30,06	30,77
Total	48,38	48,97	49,88	49,91	48,66	49,76	51,11	51,64

Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Lokasi Proyek, diolah



BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2024 tumbuh 4,15% (yoy), tetap kuat kendati melandai dibandingkan triwulan sebelumnya 5,17% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera yang tumbuh 4,60% (yoy), maupun nasional 4,95% (yoy). Dari sisi pengeluaran, tetap kuatnya perekonomian Aceh ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan eksternal. Dari sisi sektoral, tetap solidnya kinerja perekonomian terutama ditopang oleh Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, LU Pertambangan, dan LU Transportasi dan Pergudangan.

1.1. Gambaran umum

Perekonomian Aceh pada triwulan IV 2024 tumbuh positif dan tetap solid. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Aceh tercatat tumbuh 4,15% (yoy), setelah pada triwulan III 2024 tumbuh 5,17% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kuatnya perekonomian Aceh ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan eksternal. Lebih tingginya aktivitas domestik tercermin dari peningkatan kinerja konsumsi RT dan konsumsi pemerintah. Lebih lanjut, kinerja ekspor luar negeri terakselerasi seiring meningkatnya permintaan komoditas ekspor (batu bara dan kopi).

Pertumbuhan ekonomi Aceh lebih tinggi tertahan oleh berlalunya penyelenggaraan PON, yang terindikasi oleh penurunan pada LU yang terkait penyelenggaraan PON antara lain LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makmin. Selain itu, LU Konstruksi juga mengalami penurunan seiring dengan selesainya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

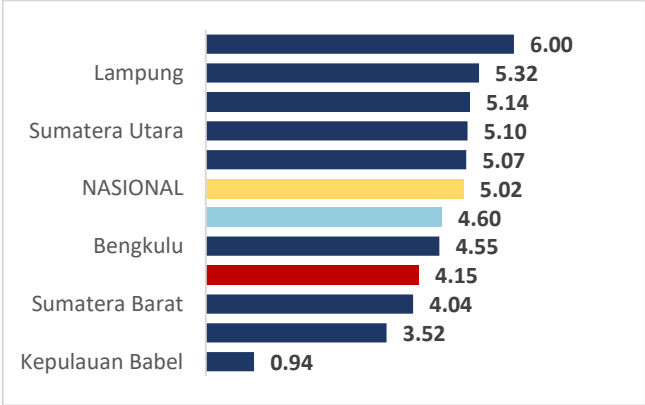
Dari sisi permintaan, faktor yang menyebabkan lebih rendahnya pertumbuhan berasal dari menurunnya pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), lebih rendahnya pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan lebih tingginya Impor. Menurunnya konsumsi LNPRT seiring berlalunya masa kampanye Pilkada. Sedangkan lebih rendahnya pertumbuhan PMTB seiring dengan selesainya berbagai PSN di Aceh.

Kinerja Perekonomian Triwulan IV 2024

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan angka triwulan sebelumnya. Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (yoy). Sementara itu, ekonomi Sumatera pada triwulan IV 2024 tumbuh stabil sebesar 4,60% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,48% (yoy) (Grafik 1.1).

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV 2024 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada periode laporan, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,17% (yoy) (Grafik 1.2). Kinerja ekonomi Aceh tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera maupun Nasional.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2024 (% , yoy)

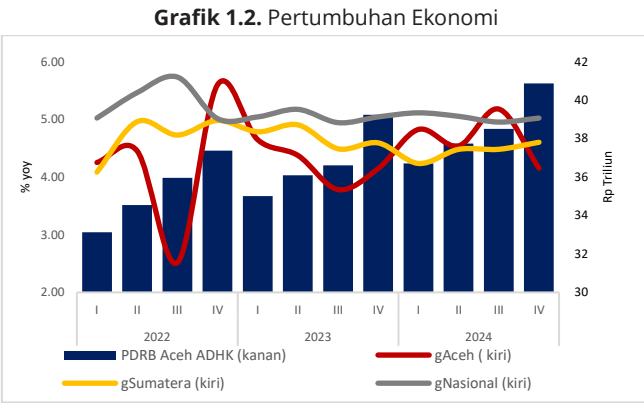


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dari sisi permintaan, faktor yang menyebabkan lebih rendahnya pertumbuhan berasal dari menurunnya pertumbuhan Konsumsi LNPRT, lebih rendahnya pertumbuhan PMTB dan lebih tingginya Impor. Menurunnya konsumsi LNPRT seiring berlalunya masa kampanye Pilkada. Lebih rendahnya pertumbuhan PMTB seiring telah selesainya berbagai PSN di Aceh. Sementara, masih tingginya ketergantungan Aceh terhadap komoditas dari luar daerah menjadi pendorong meningkatnya Impor pada triwulan IV 2024. Komponen permintaan lainnya masih menunjukkan kinerja positif terutama ekspor didorong oleh meningkatnya permintaan komoditas batubara berkalori rendah dari negara mitra dagang.

Dari sisi Lapangan Usaha, lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2024 terutama bersumber dari menurunnya kinerja LU yang terkait penyelenggaraan PON seperti LU Perdagangan dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makmin. Selain itu, LU Konstruksi juga mengalami penurunan seiring sudah selesainya pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun demikian, terdapat beberapa LU yang masih

menunjukkan kinerja yang membaik didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 yaitu LU Transportasi dan Pergudangan dan LU Administrasi Pemerintah. Di samping itu, LU Pertambangan tumbuh meningkat seiring meningkatnya permintaan ekspor komoditas batubara terutama dari India.



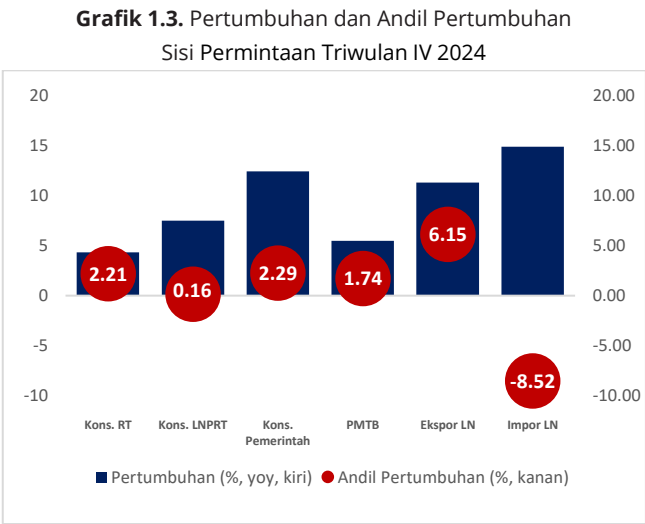
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan angka pertumbuhan tersebut, kontribusi Aceh terhadap ekonomi Sumatera tercatat sebesar 4,99%, relatif stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan pangsa perekonomian terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,14%) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,21%). Sementara itu, Sumatera Utara (23,55%), Riau (22,84%), dan Sumatera Selatan (13,63%) masih menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Sumatera.

1.2. Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Aceh bersumber dari peningkatan kinerja Ekspor Barang dan Jasa, serta masih kuatnya Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Ekspor Barang dan Jasa menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi pada sisi permintaan pada triwulan IV 2024. Ekspor Barang dan Jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 6,15%. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga memberikan andil pertumbuhan yang tinggi sebesar 2,29% di tengah penyelenggaraan Pilkada

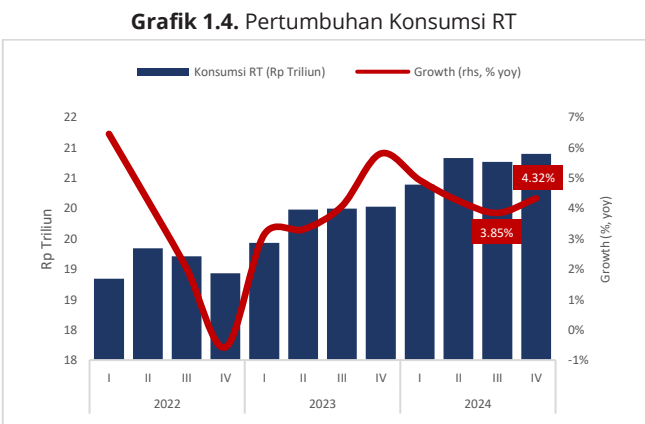
2024. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh daya beli masyarakat yang tetap kuat ditengah HBKN Natal dan Tahun baru turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2,21% (Grafik 1.3).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan IV 2024, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Konsumsi rumah tangga pada periode laporan tumbuh sebesar 4,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,85% (yoy) (Grafik 1.4). Tingkat pertumbuhan ini membuat konsumsi rumah tangga memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,21%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, turut didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga di tengah perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru 2025.

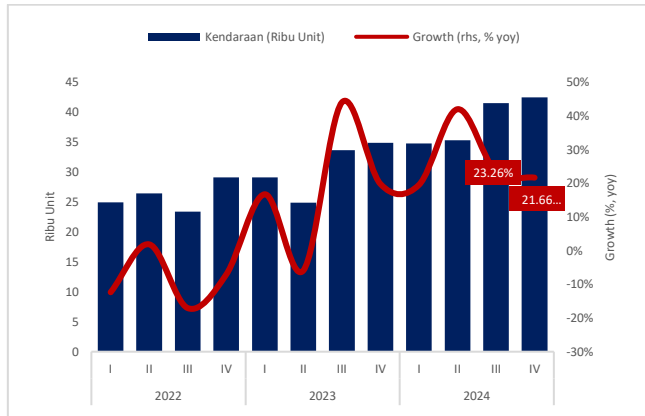


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya penjualan

kendaraan di Aceh, dari 41.498 unit pada triwulan III 2024 ke angka 42.441 unit pada triwulan IV 2024. Kendati demikian, penjualan unit kendaraan pada triwulan IV tumbuh sebesar 21,66% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 23,26% (yoy) (Grafik 1.5).

Grafik 1.5. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), diolah

Masih kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, turut ditopang oleh tetap tingginya pembiayaan konsumsi. Walaupun mengalami deselerasi, konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat didukung oleh peningkatan pembiayaan konsumsi yang tumbuh sebesar 10,14% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,30% (% yoy) (Grafik 1.6).

Grafik 1.6. Perkembangan Pembiayaan Konsumsi



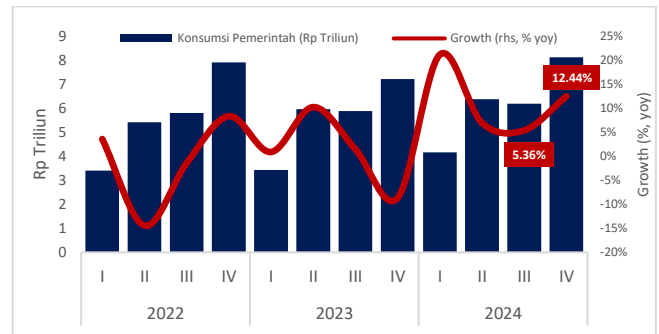
Sumber : Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah masih tumbuh kuat di tengah penyelenggaraan Pilkada 2024 di Aceh. Pada triwulan IV 2024, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 12,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 5,36% (yoy) (Grafik 1.7). Hal ini dikarenakan oleh

proses percepatan realisasi anggaran menjelang akhir tahun, serta penyelenggaraan Pilkada pada bulan November 2024.

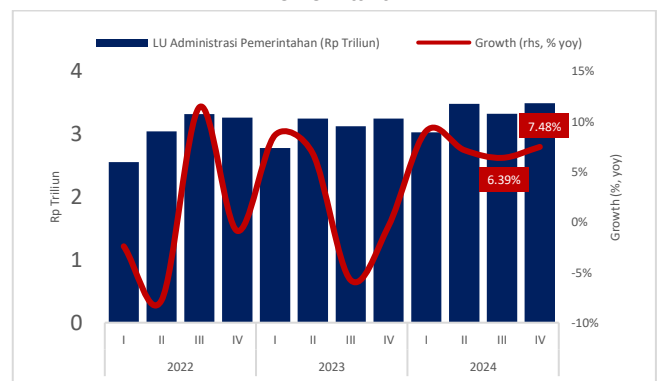
Grafik 1.7. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

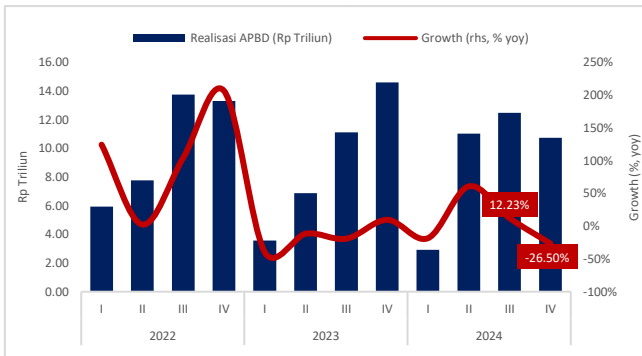
Lebih tingginya pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tercermin juga dari meningkatnya LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Pada triwulan IV 2024, LU tersebut tumbuh sebesar 7,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,39% (yoy) (Grafik 1.8).

Grafik 1.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

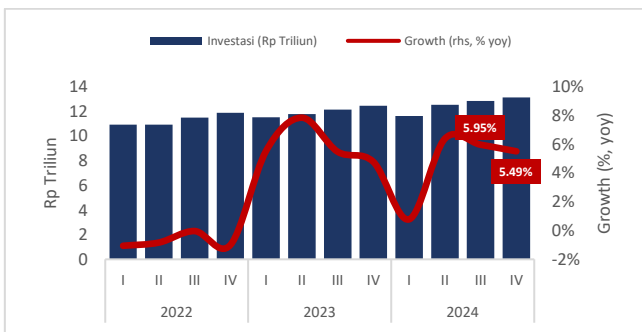
Kendati angka Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan, Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) justru terkontraksi sebesar 26,50% (yoy). Hal ini dikarenakan angka penyerapan anggaran yang hanya mencapai 91,24%, per 31 Desember 2024 atau lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya sebesar 92,85% (Grafik 1.9). Kontraksi juga dikarenakan turunnya presentase realisasi belanja operasional, yang merupakan kontributor terbesar pada belanja daerah.

Grafik 1.9. Perkembangan Realisasi APBD

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPb), diolah

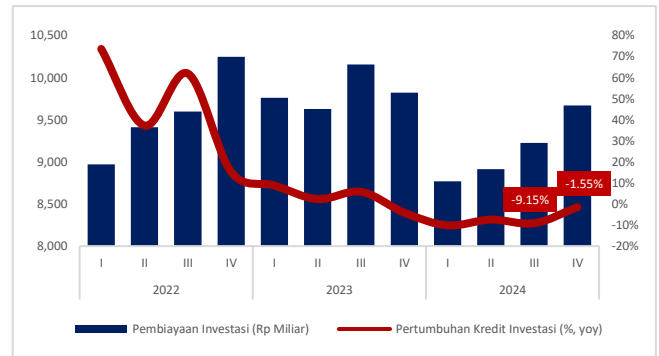
Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pada triwulan IV 2024, PMTB di Aceh tetap kuat di tengah penyelesaian berbagai proyek infrastruktur. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Aceh pada triwulan IV 2024 tumbuh kuat sebesar 5,49% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,95% (yoy) (Grafik 1.10). Walaupun angka pertumbuhan PMTB melambat, realisasi pertumbuhan tetap kuat didukung oleh penyelesaian pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh pada triwulan laporan, seperti Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh.

Grafik 1.10. Pertumbuhan PMTB

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

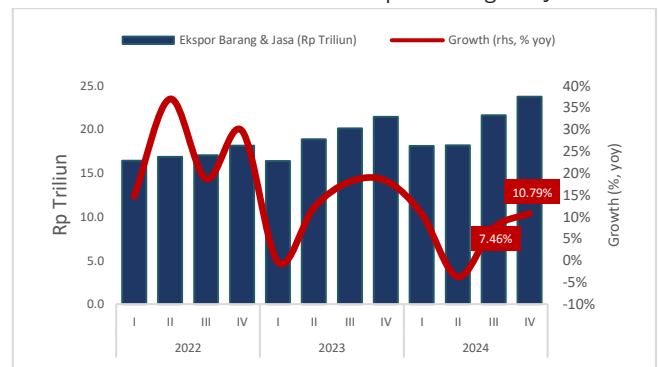
Pembiayaan investasi pada triwulan laporan masih tumbuh terbatas. Pembiayaan investasi secara nilai mengalami peningkatan dari Rp9,23 triliun pada triwulan III 2024 menjadi Rp9,66 triliun pada triwulan IV 2024. Angka realisasi tersebut masih tumbuh negatif sebesar -1,55% (yoy) dibandingkan dengan pembiayaan investasi pada periode yang sama tahun sebelumnya, kendati demikian angka ini telah membaik dibandingkan dengan angka triwulan sebelumnya sebesar -9,15% (yoy) (Grafik 1.11).

Grafik 1.11. Perkembangan Pembiayaan Investasi

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Ekspor Barang dan Jasa

Membayarnya permintaan dan harga komoditas mendorong kinerja ekspor barang dan jasa tumbuh meningkat pada triwulan IV 2024. Ekspor Barang dan Jasa Aceh pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 10,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,46% (yoy) (Grafik 1.12). Perbaikan kinerja ekspor barang dan jasa didukung oleh peningkatan ekspor komoditas utama seperti batubara dan kopi seiring dengan meningkatnya permintaan dan membaiknya harga kedua komoditas tersebut.

Grafik 1.12. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Ekspor batubara menjadi pendorong utama meningkatnya kinerja ekspor barang dan jasa. Pada triwulan IV 2024, ekspor barang dan jasa Aceh utamanya ditopang oleh ekspor batubara dengan pangsa sebesar 72,96%. Ekspor batubara pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 196,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 48,07% (yoy) (Grafik 1.13). Meningkatnya kinerja ekspor batubara sejalan dengan harga batubara yang mengalami penurunan dari USD 77,01/metric ton pada triwulan III 2024 menjadi USD 76,04/metric ton pada triwulan

IV 2024. Penurunan harga ini turut mendorong permintaan ekspor, khususnya permintaan dari India sebagai importir utama batubara dari Aceh.

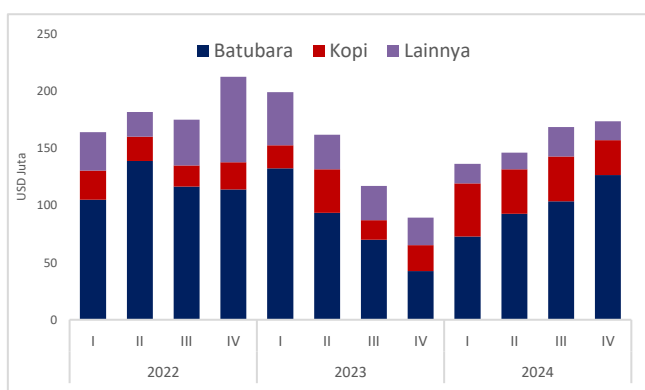
Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Batubara



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Ekspor komoditas utama lainnya yaitu kopi masih menunjukkan peningkatan. Komoditas ekspor luar negeri Aceh terbesar kedua setelah Batubara adalah kopi dengan pangsa 17,49% (Grafik 1.14). Pada triwulan IV 2024, ekspor kopi Aceh mencapai USD30,33 juta, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD39,21 juta. Sementara itu, ekspor lainnya (pangsa 9,54%) umumnya terdiri komoditas rempah-rempah, minyak nabati, pupuk, produk kimia, dan ikan olahan. Pada periode laporan, ekspor lainnya memberikan nilai ekspor sebesar USD16,55 juta, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar USD25,61 juta.

Grafik 1.14. Perkembangan Ekspor Komoditas Utama Aceh



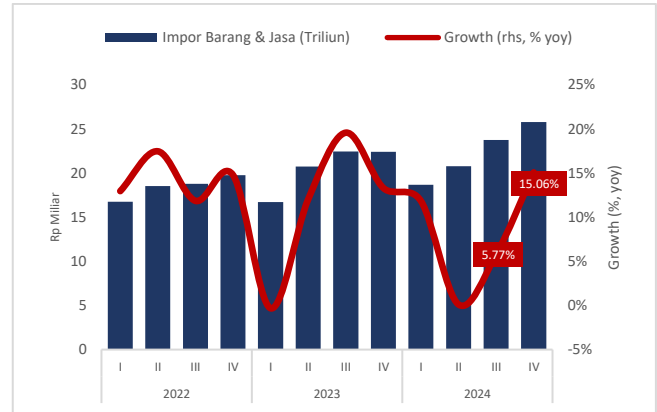
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Impor Barang dan Jasa

Impor barang dan jasa mengalami akselerasi sejalan dengan kenaikan impor bahan bakar mineral pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2024, impor barang dan jasa tumbuh sebesar 15,06% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya

sebesar 5,77% (yoy) (Grafik 1.15). Secara umum, kinerja impor barang dan jasa didominasi oleh impor komoditas migas terutama gas dan aspal dengan pangsa mencapai 88,96% dari total impor pada triwulan laporan.

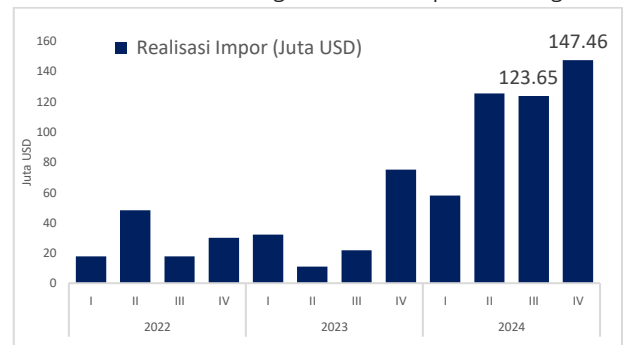
Grafik 1.15. Pertumbuhan Impor Barang dan Jasa



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Impor Aceh pada triwulan IV 2024 tetap tinggi didorong oleh impor migas. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh, nilai impor barang Aceh pada triwulan IV 2024 sebesar USD147,46 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya sebesar USD123,65 juta. (Grafik 1.16).

Grafik 1.16. Perkembangan Realisasi Impor Luar Negeri



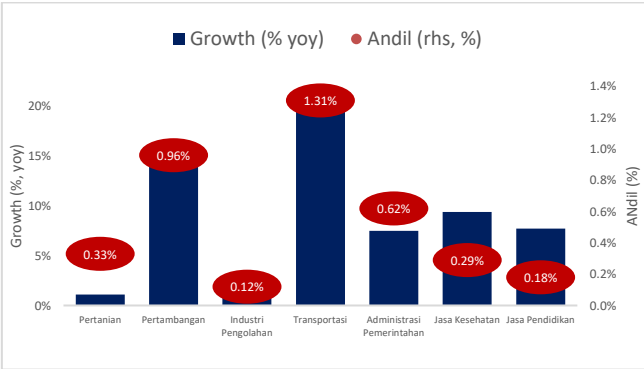
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

1.3. Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi penawaran, pertumbuhan utamanya didorong oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha (LU) Transportasi dan Pergudangan, LU Pertambangan dan LU Administrasi Pemerintah. LU Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar pada triwulan laporan sebesar 1,31%, LU Pertambangan sebesar 0,96%, serta disusul oleh LU Administrasi

Pemerintahan sebesar 0,62% (Grafik 1.17). Sementara itu, LU Pertanian memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 0,33% pada triwulan laporan. Walaupun demikian LU Pertanian masih memiliki pangsa terbesar bagi PDRB Aceh sebesar 28,73%, disusul LU Perdagangan sebesar 15,34%, LU Kontruksi sebesar 10,07%, LU Administrasi Pemerintahan sebesar 8,55%, serta LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,23%.

Grafik 1.17. Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Sisi LU Utama Triwulan IV 2024

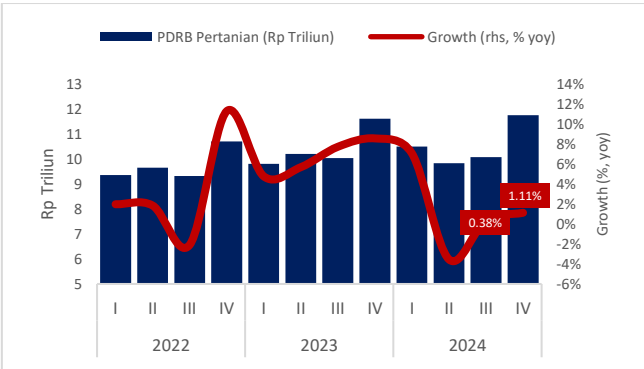


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Kinerja LU Pertanian tercatat meningkat seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi padi dan tercermin pada membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP) di Aceh pada triwulan IV. LU Pertanian Aceh pada triwulan IV tumbuh sebesar 1,11% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,38% (yoy) (Grafik 1.18). Meningkatnya kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi padi dan tercermin pada meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) di triwulan IV.

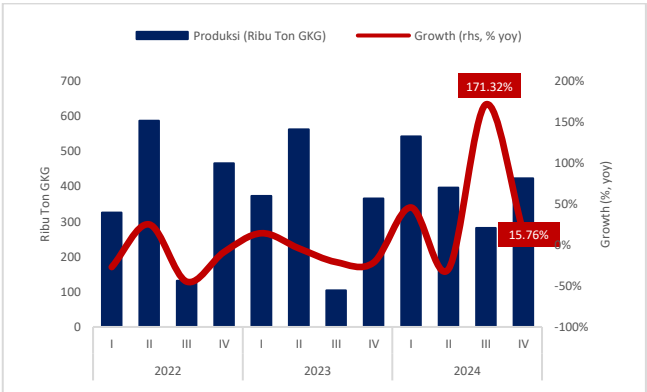
Grafik 1.18. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan produksi padi mengalami peningkatan pada triwulan IV 2024 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, produksi padi di Aceh mencapai 423,23 ribu ton GKG, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 281,9 ribu ton GKG. Peningkatan ini juga tercermin dari sisi pertumbuhan produksi padi mengalami peningkatan 15,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 171,32% (yoy) (Grafik 1.19). Pada tahun 2024, diperkirakan luas panen padi mengalami peningkatan sebesar 46,79 ribu hektar dengan total luas lahan sebesar 301,08 ribu hektar atau naik sebesar 18,40% (yoy) dari tahun 2023 dengan total luas lahan sebesar 254,29 ribu hektar.

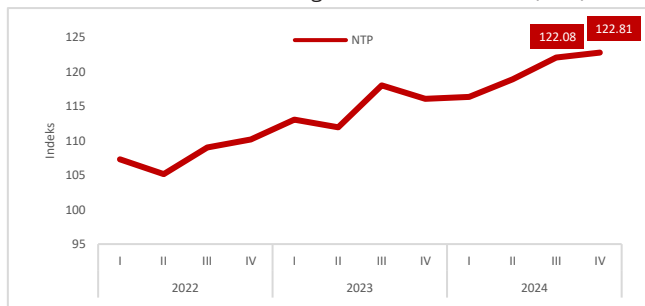
Grafik 1.19. Perkembangan Produksi Padi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Peningkatan kinerja LU Pertanian juga tercermin dari peningkatan NTP pada triwulan laporan. NTP pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,57% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau sebesar 122,81, lebih tinggi dari angka triwulan III 2024 sebesar 122,08 (Grafik 1.20). Peningkatan nilai NTP ini didorong dari peningkatan Indeks yang Diterima Petani (It) sebesar 143,91 pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 141,54, atau naik sebesar 1,20%. Peningkatan pada Indeks yang Diterima Petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada Indeks yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,63% atau sebesar 117,18 pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 116,2.

Grafik 1.20. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kinerja LU Perdagangan pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2024, LU Perdagangan tercatat berkontraksi sebesar 0,02% (yoy), jauh di bawah angka triwulan sebelumnya sebesar 3,96% (yoy) (Grafik 1.21). Melambatnya kinerja LU Perdagangan selain dikarenakan adanya faktor *Base Effect* dari periode yang sama di tahun 2024, juga dipengaruhi oleh melambatnya penjualan kendaraan sepeda motor, serta tingginya tingkat inflasi pada triwulan laporan yang membatasi daya beli masyarakat.

Grafik 1.21. Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan

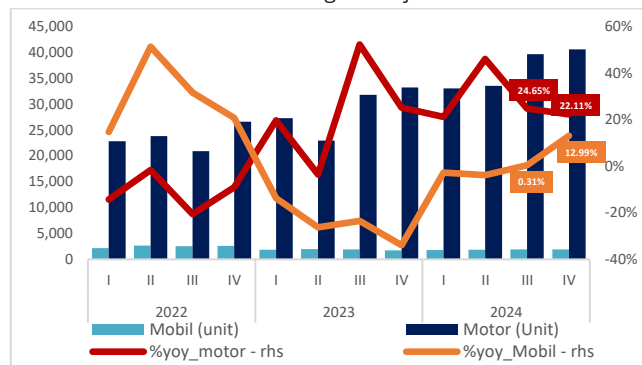


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Lebih rendahnya kinerja LU Perdagangan di antara lain didorong oleh melambatnya angka pertumbuhan penjualan kendaraan sepeda motor pada triwulan laporan. Berdasarkan Grafik 1.15, Pada triwulan III 2024, penjualan kendaraan mencapai 42.443 unit kendaraan, dengan 40.512 unit diantaranya merupakan sepeda motor dan 1.931 unit merupakan mobil. Penjualan sepeda motor melambat ke angka 22,11% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 24,65% (yoy). Sedangkan penjualan mobil meningkat ke

angka 12,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,31% (yoy) (Grafik 1.22).

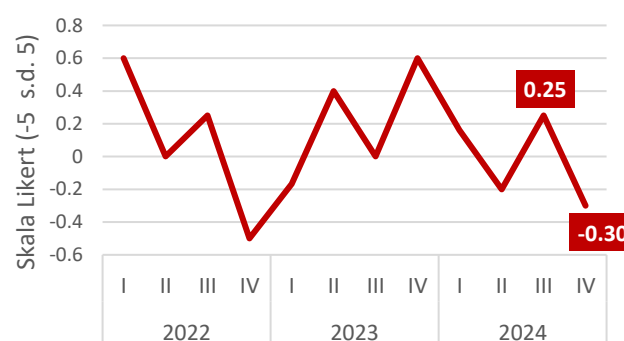
Grafik 1.22. Perkembangan Penjualan Kendaraan



Sumber: BPKA, diolah

Melambatnya kinerja LU Perdagangan, juga tercermin pada hasil liaison dunia usaha LU Perdagangan. Pada triwulan IV 2024, dunia usaha LU Perdagangan tercatat mengalami penurunan margin berdasarkan hasil *liaison* perusahaan industri perdagangan. *Liaison* dilakukan menggunakan skala likert di mana angka positif menunjukkan peningkatan margin perusahaan dan angka negatif menunjukkan penurunan margin. Rata-rata nilai skala *likert* margin keuntungan kontak *liaison* pada triwulan IV tercatat sebesar -0,30 atau turun dari posisi triwulan sebelumnya sebesar 0,25.

Grafik 1.23. Perkembangan Margin Berdasarkan Skala Likert Survei *Liaison* Perusahaan Industri Perdagangan



Sumber: *Liaison*, Bank Indonesia

Kendati mengalami perlambatan, pembiayaan LU Perdagangan tercatat tetap tinggi. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp6,87 triliun atau tumbuh sebesar 8,28% (yoy). Nilai ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 1,91% (yoy) dengan pembiayaan mencapai Rp6,72 triliun (Grafik 1.23).

Grafik 1.24. Penyaluran Pembiayaan Sektor Perdagangan



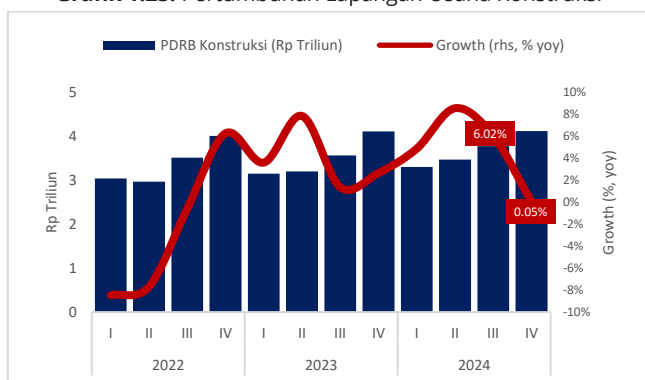
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan IV 2024 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2024, LU Konstruksi tumbuh melambat yaitu sebesar 0,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,02% (yoy) (Grafik 1.24). Melambatnya kinerja LU Konstruksi sejalan dengan terkontraksinya pembiayaan sektor konstruksi dan perkembangan pengadaan semen. Melambatnya LU Konstruksi bertepatan dengan selesainya beberapa Proyek Strategis Nasional yang ada di Aceh, seperti Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, serta jalan tol Sigli-Banda Aceh.

Grafik 1.25. Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi

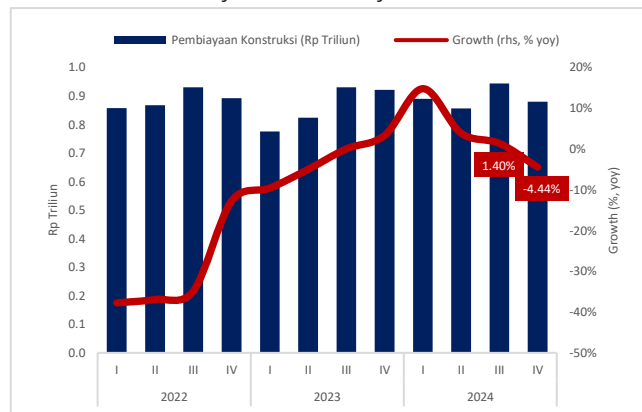


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pelambatan kinerja LU Konstruksi tercermin dari menurunnya pembiayaan Sektor Konstruksi.

Pada triwulan laporan, nilai pembiayaan Sektor Konstruksi di Aceh mencapai Rp0,88 triliun atau terkontraksi sebesar 4,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy) dengan nilai pembiayaan mencapai Rp0,94 triliun (Grafik 1.25).

Grafik 1.26. Penyaluran Pembiayaan Sektor Konstruksi

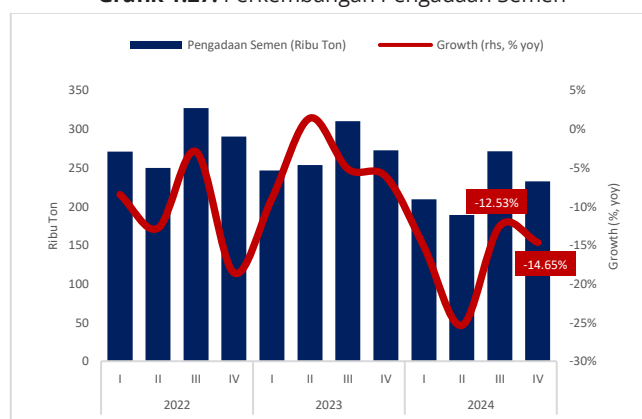


Sumber: Laporan Bank Umum (LBU), lokasi proyek, diolah

Melambatnya kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari masih terkontraksinya pengadaan semen.

Kinerja pengadaan semen pada triwulan laporan masih tumbuh negatif, meskipun lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, pengadaan semen tumbuh sebesar -14,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -12,53% (yoy) (Grafik 1.25).

Grafik 1.27. Perkembangan Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia (ASI), diolah

Lapangan Usaha Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor batubara.

Pada triwulan IV 2024, LU Pertambangan tercatat tumbuh sebesar 14,68% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,86% (yoy) (Grafik 1.27). Tingginya pertumbuhan LU Pertambangan sejalan dengan meningkatnya permintaan dan kinerja ekspor batubara.

Grafik 1.28. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pertumbuhan pembiayaan LU Pertambangan semakin membaik namun masih tumbuh negatif. Hal ini tercermin dari perkembangan sisi pembiayaan sektor ini yang menunjukkan perbaikan. Pada triwulan laporan, posisi pembiayaan mencapai Rp1,81 triliun masih mengalami penurunan sebesar -25,08% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -40,52% (yoy) (Grafik 1.28).

Grafik 1.29. Penyaluran Pembiayaan Sektor Pertambangan

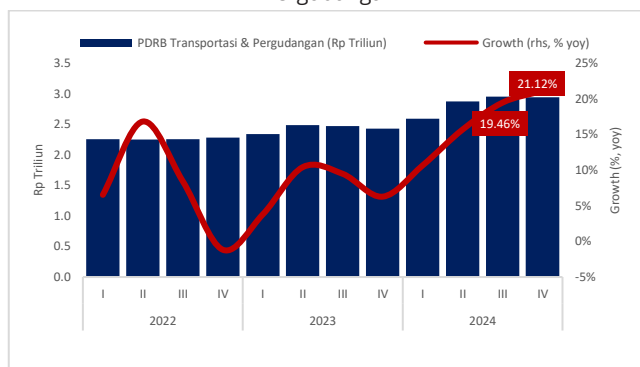


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan IV 2024 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami akselerasi dengan tumbuh sebesar 21,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,46% (yoy) (Grafik 1.29). Meningkatnya kinerja LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan peningkatan mobilitas di tengah pelaksanaan Pilkada, serta perayaan HBKN Natal dan Tahun Baru 2025.

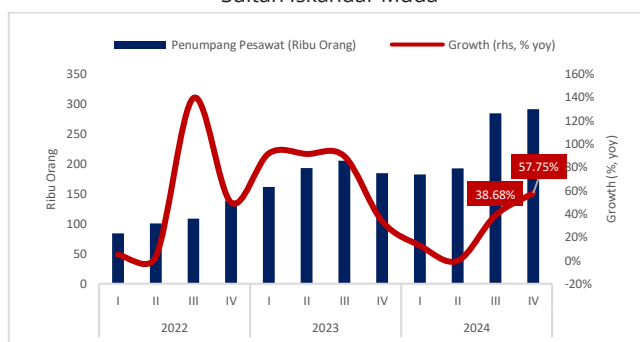
Grafik 1.30. Pertumbuhan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Hari libur perayaan Natal dan Tahun Baru turut mendorong peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Pada triwulan IV 2024, jumlah penumpang pesawat (berangkat dan datang) di Bandara Sultan Iskandar Muda mencapai 291,3 ribu orang atau tumbuh sebesar 57,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 38,68% (yoy) (Grafik 1.30).

Grafik 1.31. Perkembangan Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda

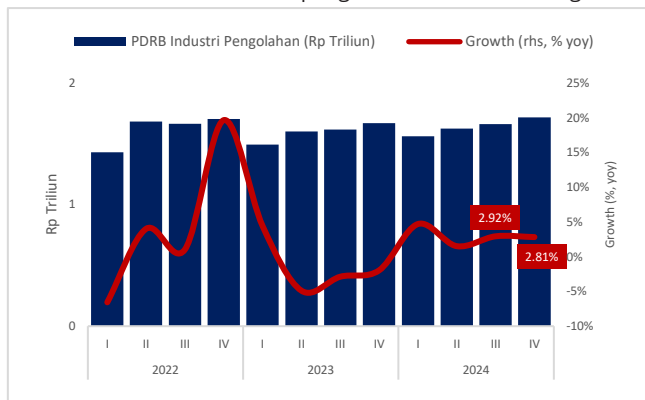


Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Angka pertumbuhan LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2024 tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh sebesar 2,81% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,92% (yoy) (Grafik 1.31). Melambatnya angka pertumbuhan ini sejalan dengan menurunnya angka penggunaan listrik industri, serta nilai SKDU sektor tersebut yang relatif stabil.

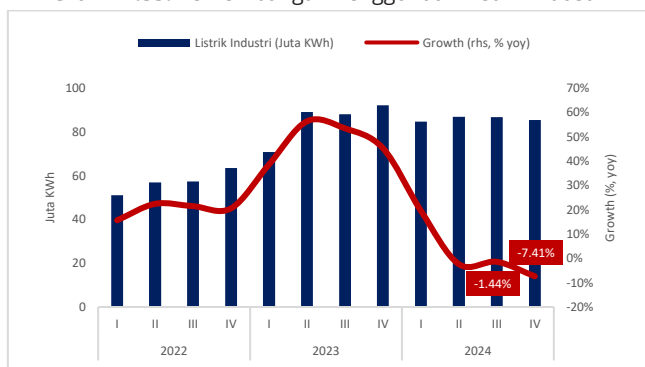
Grafik 1.32. Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Melambatnya angka pertumbuhan LU Industri Pengolahan tercermin dari menurunnya penggunaan listrik industri pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2024, penggunaan listrik industri berkontraksi sebesar 7,41% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -1,44% (yoy) (Grafik 1.32). Menurunnya penggunaan listrik untuk industri ini mengkonfirmasi adanya penurunan aktivitas industri pengolahan pada triwulan laporan.

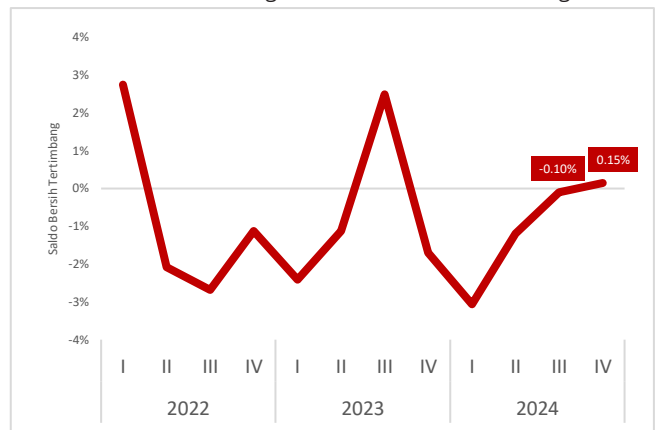
Grafik 1.33. Perkembangan Penggunaan Listrik Industri



Sumber: Perusahaan Listrik Negara (PLN), diolah

Melambatnya kinerja LU Industri Pengolahan tercermin dari nilai Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang membaik terbatas. Nilai SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan IV tercatat menjadi 0,15% Saldo Bersih Tertimbang (SBT), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,10% (Grafik 1.33).

Grafik 1.34. Perkembangan SKDU Sektor Industri Pengolahan

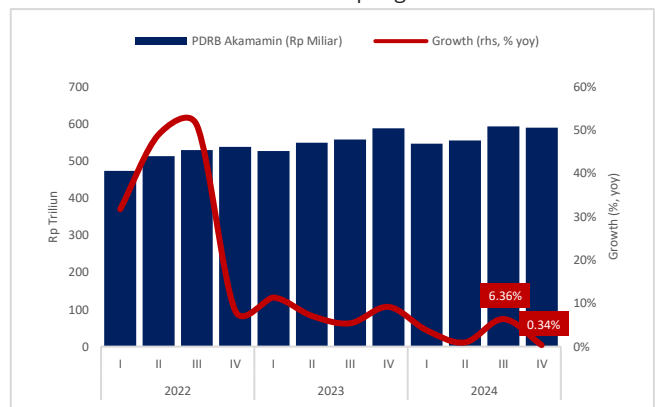


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan IV 2024 tercatat melambat. Pada triwulan IV 2024, angka pertumbuhan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat sebesar 0,34% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,36% (yoy) (Grafik 1.34).

Grafik 1.35. Pertumbuhan Lapangan Usaha Akmamin



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kunjungan wisatawan mancanegara pada triwulan laporan juga mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2024, di tengah HBKN Natal dan libur Tahun Baru 2025 angka pertumbuhan wisatawan mancanegara tercatat mengalami perlambatan dari 34,62% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 2,46% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.35).

Grafik 1.36. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara

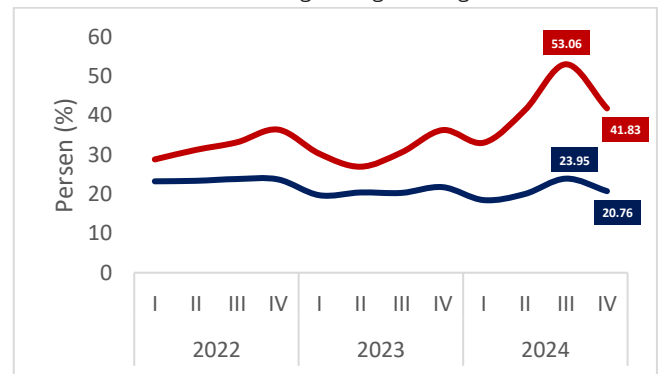


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kendati demikian, Tingkat Penghunian Kamar juga mengalami penurunan pada triwulan laporan. Pada triwulan IV 2024, Tingkat Penghunian Kamar untuk Hotel Berbintang menurun menjadi 41,83%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 53,35%. Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar untuk Akomodasi Lainnya juga

menunjukkan penurunan menjadi 20,76%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,95%. Penurun ini terjadi seiring dengan normalisasi tingkat hunian akomodasi pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.36).

Grafik 1.37. Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

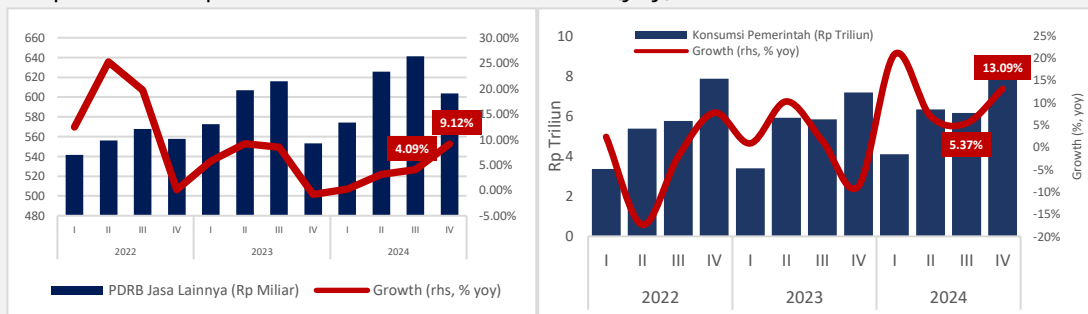
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI ACEH 2024: “PESTA DEMOKRASI SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH”

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan ajang kontestasi politik yang diadakan lima tahun sekali, dalam rangka menentukan pimpinan daerah dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Pada tahun 2024, Pilkada diadakan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Di Aceh, Pilkada Serentak melibatkan 24 partai politik dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Aceh menggelontorkan anggaran sebesar Rp184,4 Miliar. Anggaran ini digunakan untuk keperluan operasional selama pelaksanaan Pilkada di seluruh kabupaten/kota.

Selain dari itu, Pemerintah Aceh juga menerapkan kebijakan batas maksimal dana kampanye bagi pasangan calon pimpinan daerah. Sebagai contoh, dana pelaksanaan kampanye untuk para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dibatasi pada angka Rp412miliar, dengan Rp150 Miliar diantaranya dialokasikan untuk bahan kampanye seperti papan reklame, baliho, umbul-umbul dan spanduk. Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, dana kampanye dibatasi pada angka Rp12,6 Miliar bagi setiap pasangan.

Dampak belanja pelaksanaan Pilkada terhadap pertumbuhan perekonomian daerah juga telah dibuktikan oleh berbagai studi literatur. Mardini dan Darmita (2024) dalam *“Analysis of The Influence of Elections on The Indonesian Economy”* mengatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pilkada akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi, khususnya konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (LNPR). Peningkatan konsumsi LNPR, dikarenakan pengeluaran Partai Politik untuk keperluan kampanye yang tercatat sebagai Pelaku LNPR. Sebagai contoh, BPS mencatat menjelang pelaksanaan Pilpres pada Triwulan I 2024, konsumsi LNPR di Aceh pada Triwulan IV 2023 meningkat sebesar 21,88% (yoy). Menjelang pelaksanaan Pilkada pada bulan November, di Aceh sendiri konsumsi LNPR pada Triwulan III 2024 meningkat sebesar 18,95% (yoy) dan pada Triwulan IV 2024 meningkat sebesar 7,51% (yoy).

Seluruh anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan Pilkada, baik oleh partai politik maupun oleh pemerintah, terindikasi berdampak positif pada perkeekonomian Aceh baik dari sisi penawaran maupun sisi Lapangan Usaha. Dari sisi penawaran, hal ini dapat dilihat dari peningkatan Lapangan Usaha (LU) yang berkaitan dengan Pilkada seperti LU Jasa Lainnya yang tercatat meningkat 9,12% (yoy). Pada sisi permintaan peningkatan tercermin pada meningkatnya angka konsumsi pemerintah pada triwulan IV sebesar 12,44% (yoy).



Grafik Pertumbuhan PDRB, LU Jasa Lainnya,
Serta angka Konsumsi Pemerintah Aceh
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

--000--



BAB II

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi agregat Belanja Pemerintah di Aceh sampai dengan triwulan IV 2024 membaik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp88,56 triliun, meningkat dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp84,27 triliun.

2.1. Gambaran umum

Realisasi agregat Belanja Pemerintah di Aceh sampai dengan triwulan IV 2024 membaik dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, agregat Belanja Pemerintah (APBN + APBD) mencapai Rp88,56 triliun, meningkat dibandingkan realisasi di tahun sebelumnya sebesar Rp84,27 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja dari sisi APBN maupun APBD. Realisasi belanja APBN pada triwulan IV 2024 meningkat menjadi Rp51,44 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48,14 triliun. Sementara itu, realisasi belanja APBD pada triwulan IV 2024 meningkat menjadi Rp37,12 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36,13 triliun.

Di sisi lain, realisasi agregat Pendapatan Pemerintah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara nominal, realisasi Pendapatan Pemerintah (APBN + APBD) pada triwulan IV 2024 mencapai Rp44,00 triliun, meningkat dibandingkan realisasi triwulan IV 2023 yang sebesar Rp42,56 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan dari sisi APBN maupun APBD. Realisasi pendapatan APBN pada triwulan IV 2024 meningkat menjadi Rp7,74 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7,17 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan APBD pada triwulan IV 2024 meningkat menjadi Rp36,26 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35,39 triliun.

2.2. Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah

Nilai pagu Belanja Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di Aceh mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai agregat pagu Belanja Pemerintah Daerah mencapai Rp40,68 triliun, meningkat sebesar 4,55% (yoy). Secara umum, pagu APBD di Provinsi dan juga

kabupaten/kota mengalami peningkatan utamanya pada belanja operasi sebesar Rp2,2 triliun.

Tabel 2. 1. Realisasi Belanja APBD Triwulan IV 2024

REALISASI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV 2024	
 Belanja Operasi	91,18%
Belanja Modal	96,76%
Belanja Tidak terduga	28,95%
Belanja Transfer	89,65%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah hingga triwulan IV 2024 mencapai Rp37,12 triliun atau 91,24% dari total pagu belanja. Persentase realisasi Belanja Pemerintah Daerah ini lebih rendah dibandingkan realisasi belanja di triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 92,85% dari pagu belanja 2023. Walaupun demikian, dari sisi nominal realisasi Belanja Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari Rp36,13 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp37,12 triliun pada tahun 2024.

Realisasi belanja Pemerintah Daerah di triwulan IV 2024 masih ditopang oleh belanja operasi.

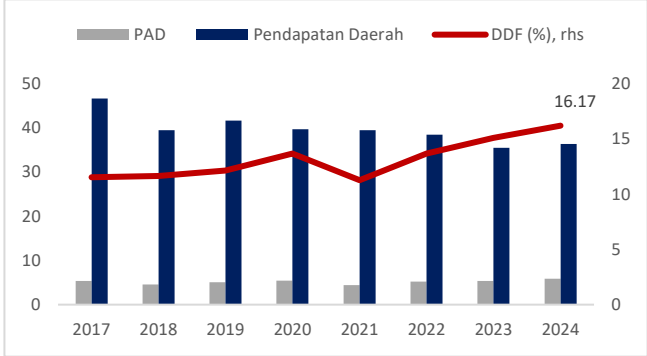
Pada periode laporan, realisasi belanja operasi mencapai Rp25,90 triliun atau sebesar 91,18% terhadap pagu. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang sebesar Rp24,37 triliun atau 93,08% dari total pagu. Selanjutnya, realisasi Belanja Modal justru mengalami penurunan realisasi dengan capaian hanya sebesar Rp3,86 triliun pada triwulan IV 2024 atau lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang dapat terealisasi sebesar Rp4,34 triliun. Walaupun demikian, dari sisi persentase realisasi terhadap pagu, Belanja Modal menunjukkan perbaikan dari 96,25% di triwulan IV 2023 menjadi hanya 96,76% pada triwulan IV 2024.

Realisasi Belanja Tidak Terduga juga mengalami peningkatan pada periode pelaporan. Belanja Tidak Terduga meningkat secara persentase realisasi terhadap pagu dari 28,37% pada triwulan IV 2023 menjadi 28,95% pada triwulan IV 2024. Hal tersebut disebabkan penurunan pagu di tahun 2024 dari Rp185,3 miliar menjadi hanya Rp117,60 miliar pada tahun 2024. Namun demikian, secara nominal

Belanja Tidak Terduga turun dari Rp52,57 miliar di triwulan IV 2023 menjadi Rp34,04 miliar pada periode yang sama di 2024.

Realisasi belanja transfer mengalami peningkatan di triwulan IV 2024 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja Transfer pada periode laporan mencapai Rp7,32 triliun atau 89,65% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut membuat pertumbuhan belanja transfer sebesar -0,58% (yoy). Baik dari sisi nominal maupun persentase realisasi, belanja transfer mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp7,37 triliun atau 91,70% dari pagu anggaran.

Grafik 2. 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Aceh



Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Realisasi Pendapatan Daerah secara nominal dan persentase pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan IV 2023. Realisasi pendapatan APBA dan APBK pada triwulan IV 2024 sebesar Rp36,26 triliun atau 91,88% dari pagu Pendapatan Daerah 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp35,39 triliun atau 94,64% dari pagu pendapatan 2023. Berdasarkan porsi komponen Pendapatan Daerah, mayoritas berasal dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 83,57% dari total realisasi pendapatan. Angka ini menurun dibanding periode sebelumnya sebesar 84,18%. Sementara komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp5,86 triliun pada triwulan IV 2024 dengan kontribusi sebesar 16,17% dari total realisasi pendapatan APBD. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh

terhadap Transfer Pemerintah Pusat masih tinggi. Namun demikian, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menunjukkan perbaikan pada periode 2017 s.d 2024 (Grafik 2.1.)

Tabel 2. 2. Realisasi Pendapatan APBD se-Aceh Triwulan IV 2024

REALISASI PENDAPATAN APBD	
TRIWULAN IV 2024	
 Pendapatan Asli Daerah	96,90%
Pendapatan Transfer	91,84%
Lain-Lain	22,22%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pada triwulan IV 2024, PAD dan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan. PAD tumbuh sebesar 10,00% (yoy) atau meningkat dari Rp5,33 triliun di triwulan IV 2023 menjadi Rp5,86 triliun di triwulan IV 2024. Kemudian, Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 1,72% dari Rp29,79 triliun di triwulan IV 2023 menjadi Rp30,30 triliun pada triwulan IV 2024. Di sisi lain, pendapatan lain-lain yang Sah menjadi komponen yang mengalami penurunan sebesar -65,33% dari Rp267,40 miliar menjadi Rp92,70 miliar.

2.3. Belanja dan Pendapatan Pemerintah Pusat

Secara nominal, realisasi belanja dan pendapatan APBN meningkat di Aceh. Belanja APBN di Aceh pada periode laporan secara persentase mencatatkan realisasi sebesar Rp51,44 triliun (98,95% dari pagu anggaran) meningkat dibanding triwulan IV 2023 yang sebesar Rp48,14 triliun (98,14% dari pagu anggaran). Di sisi lain, realisasi pendapatan APBN mencapai Rp7,74 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp7,17 triliun.

Tabel 2. 3. Realisasi Belanja APBN di Aceh Pada Triwulan IV 2024

REALISASI BELANJA APBN TRIWULAN IV 2024	
 Belanja Pusat	98,49%
Transfer	99,23%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Belanja Pusat mengalami peningkatan sebesar

12,83% dari Rp17,24 triliun menjadi Rp19,45 triliun. Komponen Belanja Pusat masih paling besar terdapat di Belanja Pegawai dengan proporsi sebesar 40,88%. Nilai Belanja Pegawai di tahun triwulan IV 2024 sebesar Rp7,95 triliun lebih tinggi dibanding tahun 2023 di periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp7,87 triliun atau naik 13,36%. Peningkatan juga diikuti oleh Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial masing-masing tumbuh sebesar 7,65%; 22,96%; dan 17,55%.

Belanja Transfer dalam APBN mengalami peningkatan secara nominal realisasi. Secara persentase, pada periode laporan realisasi tercatat sebesar 99,23% dari pagu Transfer ke Daerah 2024 (secara nominal Rp31,99 triliun) dan tumbuh sebesar 3,52% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang terealisasi 99,55% dari pagu Transfer ke Daerah 2023 (secara nominal Rp30,90 triliun). Selanjutnya, peningkatan terjadi di beberapa komponen Belanja APBN di triwulan IV 2024, yaitu Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Khusus; Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa mengalami peningkatan realisasi. Dana Alokasi Umum mencatat realisasi sebesar Rp15,81 triliun atau tumbuh sebesar 8,18% (yoy). Sementara itu, Dana Transfer khusus mencatat realisasi sebesar Rp5,58 triliun atau tumbuh sebesar 3,48% (yoy). Dana Otonomi Khusus mencatat realisasi sebesar Rp4,28 triliun atau tumbuh sebesar 8,00% (yoy). Sedangkan Dana Desa mencatat realisasi sebesar Rp4,96 triliun atau tumbuh sebesar 0,61% (yoy). Di sisi lain, Dana Bagi Hasil mengalami penurunan dengan realisasi mencapai Rp1,14 triliun atau tumbuh sebesar -31,51% (yoy). Dana Insentif Fiskal juga mengalami penurunan dengan realisasi mencapai Rp2,23 miliar atau tumbuh sebesar -34,52% (yoy)

Tabel 2. 4. Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Aceh Pada Triwulan IV 2024

REALISASI PENDAPATAN APBN		
TRIWULAN IV 2024		
	Pajak	100,96%
	PNBP	171,99%

Sumber: DJPb Provinsi Aceh, diolah

Pendapatan Negara yang terdiri Pajak dan PNBP (Pajak Negara Bukan Pajak) secara nominal mengalami peningkatan. Secara nominal, Penerimaan Pajak pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan sebesar 8,20% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi utamanya pada komponen Pajak Perdagangan Internasional yang meningkat 156,37% (yoy) atau secara nominal meningkat dari Rp148,58 miliar menjadi Rp38,92 miliar. Selain itu, Pajak Dalam Negeri meningkat sebesar 4,42% (yoy) atau secara nominal naik dari Rp5,83 triliun dari triwulan IV 2023 menjadi Rp6,09 triwulan IV 2024). Sementara itu, PNBP juga megalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 6,77% (yoy), atau meningkat dari Rp1,20 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,28 triliun pada tahun 2024.

Tabel 2. 5. Data Realisasi APBD Aceh Triwulan IV 2024

APBD PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan IV (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan IV (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan IV 2023-2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
PENDAPATAN	37.393,70	39.467,73	35.390,92	36.261,22	94,64	91,88	2,46%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.482	6.051,31	5.330,29	5.863,47	97,24	96,90	10,00%
Pendapatan Transfer	31.461	32.999,30	29.793,23	30.305,05	94,70	91,84	1,72%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	451	417,12	267,40	92,70	59,29	22,22	-65,33%
BELANJA DAERAH	38.910,09	40.680,44	36.128,02	37.116,83	92,85	91,24	2,74%
Belanja Operasi	26.181,19	28.404,58	24.368,54	25.898,56	93,08	91,18	6,28%
Belanja Modal	4.507,43	3.987,45	4.338,50	3.858,26	96,25	96,76	-11,07%
Belanja Tidak Terduga	185,30	117,60	52,57	34,04	28,37	28,95	-35,25%
Belanja Transfer	8.035,39	8.172,00	7.368,41	7.325,97	91,70	89,65	-0,58%
SURPLUS/DEFISIT	- 1.516,39	- 1.212,71	- 737,10	- 855,60	48,61	70,55	16,08%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Februari 2025

Tabel 2. 6. Data Realisasi APBN di Aceh Triwulan IV 2024

BELANJA NEGARA (APBN) DI PROVINSI ACEH	Pagu Anggaran Triwulan IV (Rp Miliar)		Realisasi Triwulan IV (Rp Miliar)		Persentase Realisasi Triwulan IV (%)		Pertumbuhan Realisasi Triwulan IV 2023-2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
PENDAPATAN	6.418,88	7.149,07	7.174,29	7.745,40	111,77	108,34	7,96%
Pajak	5.655,04	6.405,72	5.976,92	6.466,92	105,69	100,96	8,20%
PNBP	763,84	743,35	1.197,37	1.278,48	156,76	171,99	6,77%
BELANJA	48.914,07	51.985,97	48.140,24	51.440,53	98,42	98,95	6,86%
Belanja Pusat	17.875,09	19.752,03	17.241,45	19.453,77	96,46	98,49	12,83%
Transfer ke Daerah	31.038,98	32.233,94	30.898,79	31.986,76	99,55	99,23	3,52%
SURPLUS/DEFISIT APBN	-42.495,19	-44.836,90	-40.965,95	-43.695,13	96,40	97,45	6,66%

Sumber: DJPB, Kajian Fiskal Regional Februari 2025



BAB III

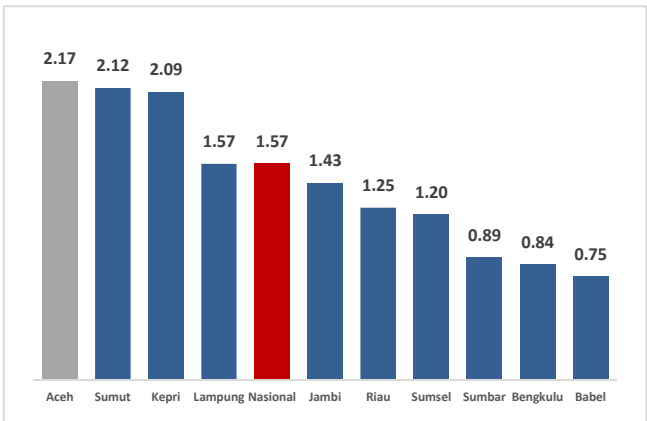
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Aceh pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 2,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi pada triwulan sebelumnya 1,50% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi Aceh pada triwulan IV 2024, terutama bersumber dari inflasi komoditas perikanan yang meningkat di tengah cuaca buruk pada akhir tahun serta komoditas pangan lain (daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng) akibat penurunan pasokan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal & Tahun Baru 2025. Namun demikian, capaian inflasi Aceh masih sesuai dengan sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$.

3.1. Perkembangan Umum Inflasi

Inflasi Aceh pada triwulan IV 2024 lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Inflasi Aceh pada periode laporan tercatat sebesar 2,17% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (1,50%, yoy). Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian inflasi Nasional (1,57% yoy) dan masih terkendali pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024 yaitu sebesar 2,5 ± 1,0% (yoy) (Grafik 3.1). Masih terkendalnya inflasi pada rentang sasaran target inflasi tahun 2024, tidak terlepas dari upaya yang dilakukan TPID se-Aceh. Sinergi dan kolaborasi intens dalam rangka pengendalian inflasi melalui strategi 4K (ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif).

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi di Sumatera Triwulan IV 2024 (% , yoy)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

3.2. Analisis Perkembangan Inflasi

Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2024 utamanya didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kelompok pengeluaran dengan andil inflasi tertinggi sebesar 1,14%. Andil inflasi tertinggi selanjutnya didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil 0,43%, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,33%, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,24%.

Sementara itu, laju inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi dengan andil sebesar -0,11% serta Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,03%.

Berdasarkan komoditasnya, penyumbang andil inflasi terbesar pada triwulan IV 2024 diantaranya emas perhiasan, tarif air minum PAM, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng dan daging ayam ras. Di sisi lain, laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh komoditas dengan andil deflasi tertinggi yaitu cabai merah, bensin, cabai rawit, ikan tongkol, dan kangkung.

Tabel 3.1. Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Barang dan Jasa	Tw III 2024		Tw IV 2024	
	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)	Inflasi (% yoy)	Andil (% yoy)
Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,31	0,48	3,12	1,14
Pakaian dan Alas Kaki	-0,73	-0,04	0,33	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,96	0,31	2,73	0,43
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,39	0,05	1,04	0,04
Kesehatan	1,88	0,03	1,16	0,02
Transportasi	0,18	0,02	-1,01	-0,11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,56	-0,02	-0,87	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	3,17	0,04	2,90	0,03
Pendidikan	1,37	0,06	1,36	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,51	0,27	2,22	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,51	0,30	5,99	0,33
Inflasi Umum	1,50		2,17	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kel. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Tabel 3.2. Inflasi Kel, Makanan, Minuman, dan Tembakau

INFLASI 3,12% (yoy)		ANDIL 1,14%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Sigaret Kretek Mesin	0,31	Cabai Merah	0,36
Minyak Goreng	0,26	Cabai Rawit	0,06
Daging Ayam Ras	0,12	Ikan Tongkol	0,05
Tomat	0,11	Kangkung	0,05
Telur Ayam Ras	0,10	Cabai Hijau	0,04
Bawang Merah	0,10	Ikan Dencis	0,03

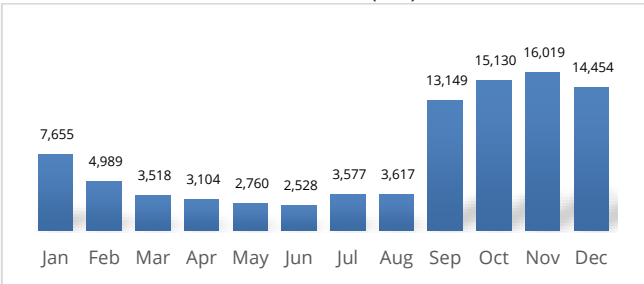
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat mengalami peningkatan dari 1,31% (yoy) pada triwulan III 2024 menjadi 3,12% (yoy) pada triwulan pelaporan dengan andil 1,14% (yoy) (tabel 3.2). Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh sub kelompok rokok dan tembakau sebesar 7,98% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi terbesar pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan minyak goreng. Kenaikan tarif cukai berdampak pada berlanjutnya kenaikan harga komoditas rokok dan tembakau. Tekanan inflasi pada subkelompok rokok dan tembakau didorong oleh keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) secara gradual sejak awal tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Sementara itu, komoditas minyak goreng mengalami peningkatan harga didorong oleh peningkatan harga minyak kelapa sawit pada triwulan IV menjadi 1.139,26 USD/metric ton, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 948,47 USD/metric ton.

Sementara itu, inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas cabai merah. Komoditas cabai merah mengalami deflasi yang disebabkan oleh melimpahnya pasokan seiring dimulainya masa musim panen cabai merah hingga akhir tahun 2024 di Aceh, serta adanya tambahan pasokan cabai merah dari luar daerah.

Grafik 3.2. Sasaran Produksi Komoditas Cabai Merah Tahun 2024 (ton)



Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, diolah

Kel. Pakaian dan Alas Kaki

Tabel 3.3. Inflasi Kel. Pakaian dan Alas Kaki

INFLASI 0,33% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Baju Muslim Wanita	0,02	Tidak Dipublikasi	
Ongkos Jahit	0,01	Tidak Dipublikasi	
Sepatu Pria	0,01	Tidak Dipublikasi	
Baju Kaos Tanpa Kerah	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami inflasi pada triwulan IV 2024. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki tercatat mengalami mencatatkan inflasi sebesar 0,33% (yoy) dengan andil sebesar 0,02% pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,73% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi disumbang terutama oleh sub kelompok alas kaki sebesar 1,76% (yoy). Komoditas baju muslim wanita menjadi komoditas penyumbang inflasi utama pada sub kelompok pakaian dengan andil sebesar 0,02%. Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh sub kelompok pakaian yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,04% (yoy).

Kel. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Tabel 3.4. Inflasi Kel. Perum., Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar

INFLASI 2,73% (yoy)		ANDIL 0,43%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tarif Air Minum PAM	0,32	Tidak Dipublikasi	
Kontrak Rumah	0,06	Tidak Dipublikasi	
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,05	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat memberikan andil inflasi terbesar kedua, yaitu sebesar 0,43%. Pada triwulan IV 2024, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat mengalami inflasi sebesar 2,73% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari sub kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 27,02% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi ini sejalan dengan keputusan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2024 pada Juni 2024 untuk menaikkan tarif air minum PAM akibat peningkatan biaya operasional perusahaan, terutama bersumber dari peningkatan harga bahan kimia untuk pengolahan air bersih. Adapun, kenaikan tarif rata-rata air minum sebesar 30%. Komoditas tarif air minum PAM memberikan andil inflasi sebesar 0,32%.

Kel. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Tabel 3.5. Inflasi Kel. Perlengkapan & Peralatan RT

INFLASI 1,04% (yoy)		ANDIL 0,04%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Upah Asisten Rumah Tangga	0,01	Tidak Dipublikasi	
Lemari Pakaian	0,01	Tidak Dipublikasi	
Kulkas	0,01	Tidak Dipublikasi	
Karpet	0,01	Tidak Dipublikasi	
Gelas Minum	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2024, tekanan inflasi kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami penurunan. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 1,04% (yoy) dengan andil 0,04%, andil inflasi pada triwulan pelaporan lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (0,05%). Tekanan inflasi bersumber dari sub kelompok Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum yang mengalami inflasi sebesar 3,85% (yoy). Di lain sisi, komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar diantaranya komoditas upah asisten rumah tangga, lemari pakaian, kulkas, karpet, gelas minum masing-masing sebesar 0,01%.

Kel. Kesehatan

Tabel 3.6. Inflasi Kel. Kesehatan

INFLASI 1,16% (yoy)		ANDIL 0,02%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Obat Dengan Resep	0,003	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju inflasi kelompok kesehatan mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara tahunan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,16% (yoy) dengan andil 0,02%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya (0,03%). Penurunan tekanan inflasi terdalam terjadi pada sub kelompok Obat-Obatan dan Produk Kesehatan dengan tingkat inflasi sebesar 1,54% (yoy), turun dari triwulan III 2024 yang sebesar 2,20% (yoy).

Tekanan inflasi kelompok kesehatan pada triwulan pelaporan dipicu oleh sub kelompok jasa kesehatan lainnya. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 6,56% (yoy) dengan harga komoditas yang meningkat utamanya, yaitu tarif *check up*. Sedangkan, inflasi terendah terjadi pada sub kelompok jasa rawat inap sebesar 0,01% (yoy).

Kel. Transportasi

Tabel 3.7. Inflasi Kel. Transportasi

INFLASI -1,01% (yoy)		ANDIL -0,11%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Bensin	0,13
Tidak Dipublikasi		Angkutan Udara	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi didorong oleh Sub Kelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi terutama komoditas bensin. Kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi sebesar 1,01% (yoy) dengan andil deflasi 0,11%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,18% (yoy). Tertahannya tekanan inflasi kelompok transportasi dipicu oleh penurunan harga BBM non subsidi di seluruh provinsi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2024 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Selain itu, komoditas tarif angkutan udara juga mengalami deflasi pada triwulan laporan. Harga tiket pesawat

dalam negeri turun sebesar 10 persen pada masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Penurunan harga tiket pesawat berlaku pada pelaksanaan penerbangan selama 16 hari mulai Kamis, 19 Desember 2024 sampai Jumat, 3 Januari 2025.

Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Tabel 3.8. Inflasi Kel. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

INFLASI -0,87% (yoy)		ANDIL -0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Tidak Dipublikasi		Telepon Seluler	0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, tercatat kembali mengalami deflasi pada periode triwulan IV 2024. Kelompok ini tercatat mengalami deflasi sebesar 0,87% (yoy) dengan andil deflasi 0,03%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar 0,56% (yoy). Deflasi bersumber dari subkelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tercatat sebesar 3,80% (yoy). Komoditas telepon seluler berkontribusi terhadap angka deflasi dengan andil 0,03%.

Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Tabel 3.9. Inflasi Kel. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

INFLASI 2,90% (yoy)		ANDIL 0,03%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Buku Tulis Bergaris	0,01	Tidak Dipublikasi	
Tas Sekolah	0,01	Tidak Dipublikasi	
Mainan Anak	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada triwulan IV 2024, inflasi kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,90% (yoy) dengan andil 0,03%. Inflasi yang terjadi pada kelompok ini disebabkan oleh sub kelompok Koran, Buku, dan Perlengkapan Sekolah yang tercatat mengalami inflasi sebesar 4,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,45% (yoy). Sementara, komoditas yang menjadi pendorong inflasi, yaitu

buku tulis bergaris, tas sekolah, dan mainan anak dengan andil masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kel. Pendidikan

Tabel 3.10. Inflasi Kel. Pendidikan

INFLASI 1,36% (yoy)		ANDIL 0,06%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Akademi/Perguruan Tinggi	0,02	Tidak Dipublikasi	
Uang Sekolah Dasar	0,02	Tidak Dipublikasi	
Taman Kanak-kanak	0,01	Tidak Dipublikasi	
Uang Sekolah Menengah Pertama	0,01	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Inflasi kelompok pendidikan stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, kelompok pendidikan mengalami peningkatan tekanan inflasi menjadi 1,36% (yoy) dengan andil 0,06%, stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,37% (yoy). Inflasi pada kelompok pendidikan utamanya bersumber dari peningkatan biaya pendidikan yang terjadi tiap tahunnya.

Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Tabel 3.11. Inflasi Kel. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

INFLASI 2,22% (yoy)		ANDIL 0,24%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Kopi Siap Saji	0,07	Tidak Dipublikasi	
Bakso Siap Santap	0,06	Tidak Dipublikasi	
Nasi Dengan Lauk	0,03	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Laju Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi kelompok ini tercatat sebesar 2,22% (yoy) dengan andil 0,24%, lebih rendah dari inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,51% (yoy). Pada triwulan IV 2024 tekanan inflasi kelompok ini terutama terjadi pada komoditas kopi siap saji yang tercatat dengan andil sebesar 0,07%, diikuti oleh komoditas bakso siap santar dengan andil sebesar 0,06, dan nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,03%.

Kel. Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya

Tabel 3.12. Inflasi Kel. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

INFLASI 5,99% (yoy)		ANDIL 0,33%	
PENYUMBANG INFLASI		PENYUMBANG DEFLASI	
KOMODITAS	ANDIL (%)	KOMODITAS	ANDIL (%)
Emas Perhiasan	0,34	Tidak Dipublikasi	

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi dengan andil yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Pada triwulan pelaporan, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tercatat sebesar 5,99% (yoy) dengan andil sebesar 0,33% lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,51% (yoy). Pendorong inflasi terutama berasal dari subkelompok perawatan pribadi lainnya yang mengalami peningkatan inflasi sebesar 17,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,80% (yoy).

Komoditas emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Andil komoditas ini mencapai 0,34% pada periode pelaporan. Kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat untuk menurunkan suku bunga. Harga emas dunia di triwulan IV 2024 mengalami peningkatan sebesar 34,58% (yoy) (Grafik 3.3). Harga emas pada triwulan IV 2024 berada pada level USD2.661/ounce. Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar USD2.477/ounce.

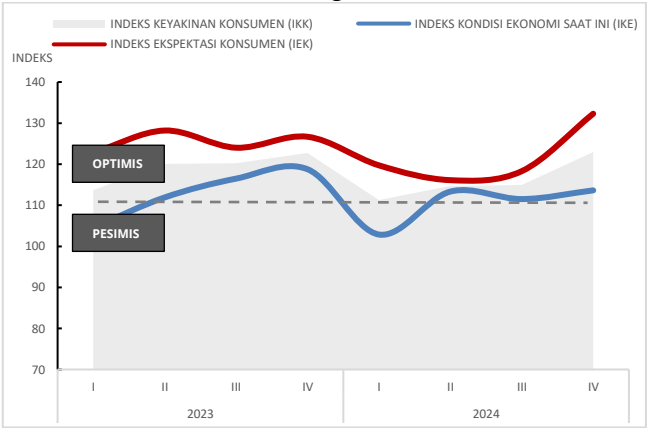
Grafik 3.3. Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

Laju inflasi triwulan IV 2024 terkendali, di tengah penguatan keyakinan dan ekspektasi masyarakat. Hal ini tercermin dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang berada di batas atas level optimis (100). Pada triwulan IV 2024, IKK tercatat sebesar 122,95 atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, IEK tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 132,29. Sedangkan IKE juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 113,62 (Grafik 3.4).

Grafik 3.4. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Survei Konsumen, Bank Indonesia

3.3. Tracking Inflasi Triwulan I 2025

Pada bulan Januari 2025, tingkat inflasi Aceh tetap terjaga sesuai rentang inflasi nasional utamanya didorong oleh kebijakan diskon tarif listrik. Melalui sinergi yang baik dalam TPID, inflasi di Aceh tetap terjaga dalam batasan sasaran inflasi nasional. Inflasi Aceh bulan Januari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,13% (mtm) dengan inflasi tahunan terjaga sebesar 1,61% (yoy). Deflasi pada bulan laporan terutama berasal dari komoditas *Administered Price*, yaitu tarif listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memberikan diskon sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300

VA, dan 2.200 VA yang berlaku selama dua bulan yaitu Januari dan Februari 2025. Kebijakan tersebut berlaku diseluruh wilayah Indonesia termasuk Aceh sehingga berdampak pada deflasi pada bulan Januari 2025 baik di level Nasional maupun Aceh.

Tekanan inflasi utamanya terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Tekanan inflasi utamanya berasal dari komoditas *Volatile Food* seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan tongkol, dan ikan dencis. Komoditas cabai dan bawang mengalami peningkatan harga di tengah menurunnya pasokan pasca panen raya pada bulan Oktober-Desember 2024. Sementara itu, komoditas ikan masih mengalami peningkatan harga akibat berkurangnya tangkapan ikan di tengah cuaca buruk yang masih melanda Aceh pada Januari 2025.

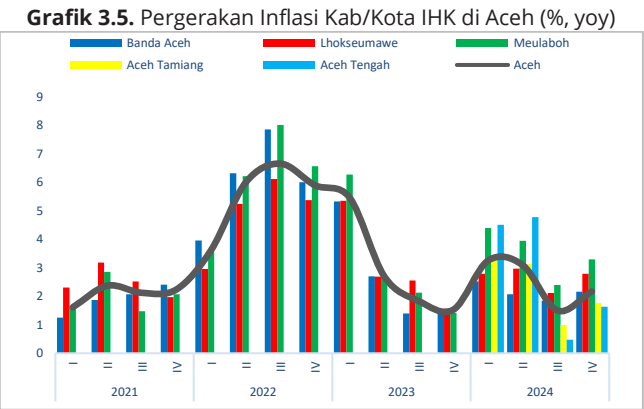
Tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya. Kelompok ini tercatat mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,07% (mtm) dengan komoditas emas perhiasan sebagai penyumbang utama. Peningkatan harga komoditas emas perhiasan tercatat masih terus meningkat sejalan dengan kenaikan harga emas global dampak eskalasi konflik geopolitik.

Pada triwulan I 2025, laju inflasi tahunan Aceh diperkirakan akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini dipicu oleh momen HBKN Ramadhan dan berakhirnya pemberian diskon pada tarif listrik pada triwulan tersebut. Perayaan HBKN Ramadhan pada tanggal 1-30 Maret 2025 berpotensi meningkatkan permintaan akibat peningkatan konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, berakhirnya pemberian diskon tarif listrik yang berakhir pada Februari 2025 berpotensi memberikan tekanan inflasi yang cukup tinggi pada bulan Maret 2025.

Untuk itu, kolaborasi dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh perlu ditingkatkan guna menjaga capaian inflasi tetap berada pada sasaran inflasi nasional $2,5\pm 1\%$ (yoy). Khususnya melalui program-program pengendalian inflasi *Volatile Food* melalui pemenuhan pasokan guna memenuhi kebutuhan di daerah.

3.4. Inflasi Spasial

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2024 tercatat mengalami peningkatan pada seluruh Kabupaten/kota pantauan di Aceh. Aceh Tengah menjadi kota yang mengalami inflasi paling rendah, yakni 1,63% (yoy) sedangkan paling tinggi, yaitu Kota Meulaboh sebesar 3,29% (yoy). Sementara secara inflasi bulanan, Banda Aceh menjadi kota dengan tingkat inflasi terendah, yaitu 0,25% (mtm) dan tertinggi, yaitu Lhokseumawe sebesar 0,97% (mtm).



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Komoditas tarif air minum (PAM) tercatat sebagai penyumbang inflasi (yoy) tertinggi sebesar 0,85% di Kota Banda Aceh. Sementara, komoditas cabai merah menjadi penyumbang deflasi terbesar yang menahan inflasi dengan andil 0,23%.

Tabel 3.13 Andil Inflasi di Kota Banda Aceh (% , yoy)

Banda Aceh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Tarif Air Minum PAM	0,85	Cabai Merah	0,23
Emas Perhiasan	0,50	Bensin	0,16
Minyak Goreng	0,21	Angkutan Udara	0,13
Kopi Siap Saji	0,19	Udang Basah	0,06
Beras	0,17	Baju Kaos Tanpa Kerah	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Selanjutnya, komoditas penyumbang inflasi (yoy) terbesar di Kota Lhokseumawe yaitu udang basah dengan andil sebesar 0,34%. Sedangkan, laju inflasi tertahan oleh komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,24%.

Tabel 3.14 Andil Inflasi di Kota Lhokseumawe (% , yoy)

Lhokseumawe	
Andil Inflasi	Andil Deflasi

Udang Basah	0,34	Cabai Merah	0,24
Daging Ayam Ras	0,30	Telepon Seluler	0,08
Kontrak Rumah	0,29	Bensin	0,08
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,29	Beras	0,07
Emas Perhiasan	0,26	Cabai Rawit	0,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tekanan inflasi lebih tinggi di kota Meulaboh tertahan oleh komoditas cabai merah sebagai komoditas penyumbang deflasi terbesar (0,22%). Sementara, komoditas penyumbang inflasi terbesar tercatat berasal dari komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar 0,97%.

Tabel 3.15 Andil Inflasi di Meulaboh (% yoy)

Meulaboh			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Emas Perhiasan	0,97	Cabai Merah	0,22
Minyak Goreng	0,39	Bensin	0,11
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,26	Ikan Cakalang	0,09
Bakso Siap Santap	0,17	Kangkung	0,06
Nasi Dengan Lauk	0,14	Shampo	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sementara, inflasi (yoy) di Aceh Tamiang didorong oleh komoditas sigaret kretek mesin dengan andil sebesar 0,62%. Namun, kenaikan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada komoditas cabai merah yang mencatatkan andil deflasi sebesar 0,54%.

Tabel 3.16 Andil Inflasi di Aceh Tamiang (% yoy)

Aceh Tamiang			
Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,62	Cabai Merah	0,54
Minyak Goreng	0,38	Ikan Tongkol	0,21
Daging Ayam Ras	0,33	Kangkung	0,19
Bawang Merah	0,22	Cabai Rawit	0,11
Kopi Bubuk	0,19	Ikan Dencis	0,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Adapun faktor penahan laju inflasi di Aceh Tengah adalah dari komoditas cabai merah yang mengalami deflasi dengan andil sebesar 0,60%. Di sisi lain, komoditas yang memberikan inflasi terbesar adalah komoditas sigaret kretek mesin (SKM) dengan andil inflasi sebesar 0,30%.

Tabel 3.17 Andil Inflasi di Aceh Tengah (% yoy)

Aceh Tengah			
-------------	--	--	--

Andil Inflasi		Andil Deflasi	
Sigaret Kretek Mesin (SKM)	0,30	Cabai Merah	0,60
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	Bensin	0,14
Bawang Merah	0,23	Cabai Rawit	0,08
Minyak Goreng	0,22	Cabai Hijau	0,08
Ikan Bandeng	0,19	Telepon Seluler	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.5. Aktivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh

Pada triwulan IV 2024, inflasi di Aceh tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dalam menjaga terkendalinya inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$, TPID Aceh menghadapi berbagai tantangan antara lain bersumber dari Pilkada serentak, kenaikan tarif air minum PAM, serta HBKN Natal dan Tahun Baru.

KPw BI Aceh bersama dengan TPID Aceh mengambil langkah strategis untuk pengendalian inflasi yang efektif dan efisien. Dalam rangka menjalankan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh TPID Aceh. Pada triwulan IV 2024 kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

1. Keterjangkauan Harga
 - a. Pelaksanaan program sinergi operasi pasar murah melalui SPHP dan GPM utamanya di 5 (lima) kab/kota IHK di Aceh yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak.
 - b. Pelaksanaan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
 - c. Kebijakan Pemberian diskon pada tarif PAM oleh Walikota Kota Banda Aceh sebesar 30% untuk kelompok Rumah Tangga 1 dan sebesar 10% untuk Rumah Tangga 2.
2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Mendorong program peningkatan produksi di daerah sentra a.l. melalui optimalisasi *Good*

Agriculture Practices, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan.

- b. Mendorong *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis.
- c. Mendorong *contract farming* antara UMKM dan kelompok tani komoditas pangan strategis.
- d. Mengakselerasi program Kerja Sama antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis, utamanya di 5 (lima) kabupaten/kota IHK di Aceh dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan.
- e. Memperkuat KAD daerah sentra dan non sentra serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi fasilitasi distribusi pangan antar daerah.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis dari daerah sentra ke non sentra dengan mempertimbangkan kebutuhan pasokan antar daerah.
- b. Mendorong pemanfaatan agen/warung/toko TPID/*mini distribution center*.

4. Komunikasi Efektif

- a. Pelaksanaan *Capacity Building* kepada TPID se-Aceh dengan tujuan *refreshment*, peningkatan pemahaman, serta penguatan sinergi antar TPID se-Aceh dalam pengendalian inflasi.
- b. Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Aceh dan TPID Kabupaten/Kota IHK se-Aceh dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi serta antisipasi risiko inflasi tahun 2024.
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Mingguan yang dihadiri TPID Aceh dan seluruh TPID Kabupaten/Kota di Aceh.
- d. Pelaksanaan *Capacity Building* menuju TPID *Champion* di Jawa Barat guna berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengendalian inflasi di daerah lain.
- e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi TPID tahun 2024 sebagai bentuk evaluasi kegiatan TPID selama

tahun 2024 dan langkah strategis yang akan dilakukan di tahun 2025.

- f. Optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) sebagai *early warning* inflasi (EWI).



BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN & UMKM

Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, tercermin dari peningkatan kinerja pembiayaan yang tercatat tumbuh 14,04% (yoy) sementara itu, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat sebesar 8,92% (yoy). Rasio pembiayaan untuk UMKM tercatat sebesar 28,27%. Lebih lanjut, risiko pembiayaan tetap terjaga tercermin dari rendahnya *Non Performing Financing* (NPF).

4.1. Kondisi Umum

Kinerja intermediasi perbankan terjaga, yang tercermin dari peningkatan kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) diiringi dengan peningkatan kinerja penyaluran pembiayaan. Berdasarkan lokasi bank, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp45,67 triliun atau meningkat sebesar 8,92% (yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan masih positif tercatat Rp43,98 triliun atau meningkat sebesar 14,04% (yoy). Dengan demikian *Financing Deposit Ratio* (FDR) 96,32% mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 95,12% (Grafik 4.1). Hal ini mencerminkan bahwa secara nominal, peningkatan total pembiayaan yang disalurkan lebih rendah dibandingkan peningkatan jumlah DPK yang dihimpun.

Grafik 4. 1 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan IV 2024 menunjukkan kondisi yang terjaga. Secara agregat, risiko pembiayaan di Aceh masih terjaga dalam batas aman yang tercermin dari NPF sebesar 1,79% di tengah peningkatan kinerja pembiayaan.

Kinerja penghimpunan DPK terpantau mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2024, nominal DPK mencapai Rp45,67 triliun, meningkat dari triwulan sebelumnya dengan nominal Rp44,70 triliun dengan pertumbuhan DPK sebesar 8,92% (yoy). Peningkatan tersebut terjadi pada DPK pemerintah yang tercatat tumbuh 19,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 12,88% (yoy). Sementara itu, DPK perseorangan dan

DPK korporasi di perbankan terpantau mengalami penurunan dari yang sebelumnya masing-masing sebesar 31,98% (yoy) dan 7,79% (yoy) menjadi 3,21% (yoy) dan 6,83% (yoy).

Grafik 4. 2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran pembiayaan meningkat terbatas. Penyaluran pembiayaan di Aceh berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2024 sebesar Rp51,64 triliun atau tumbuh sebesar 3,49% (yoy). Mencermati perkembangan tersebut FDR berdasarkan lokasi proyek tercatat relatif tinggi pada periode laporan yakni sebesar 113,10% lebih rendah dari triwulan sebelumnya 114,31% (Grafik 4.3).

Grafik 4. 3 Perkembangan Intermediasi Perbankan Aceh (Berdasarkan Lokasi Proyek)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, Non Performing Financing (NPF) berdasarkan lokasi bank masih pada rentang aman. NPF pada triwulan IV 2024 mencapai 1,79%, sedikit lebih tinggi dibanding triwulan III 2024 yang sebesar 1,64% (Grafik 4.4.), masih berada di bawah *threshold* 5%.

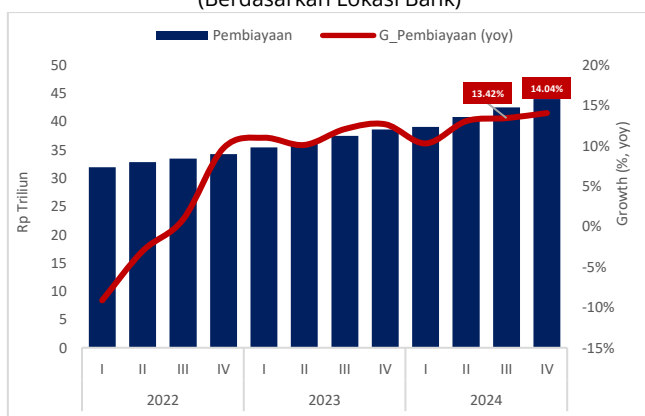
Grafik 4. 4 Perkembangan *Non-Performing Financing* (Berdasarkan Lokasi Bank)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Penyaluran pembiayaan tumbuh positif dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan berdasarkan lokasi bank kembali menunjukkan tren yang positif yaitu tumbuh sebesar 14,04% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 13,42% (yoy).

Grafik 4. 5 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan (Berdasarkan Lokasi Bank)

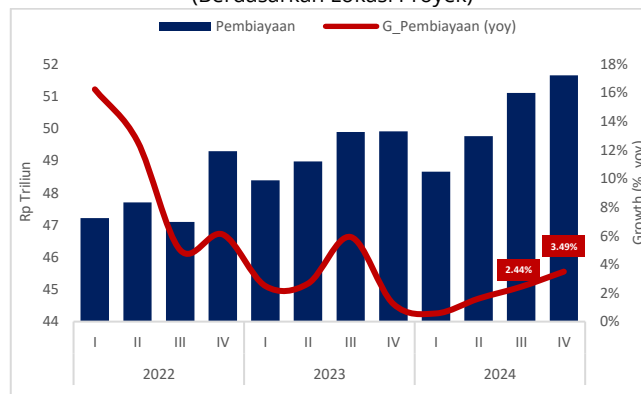


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Di sisi lain, pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dari luar Aceh terus mengalami peningkatan. Penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar Rp51,64 triliun, atau tumbuh pada tingkat 3,49% (yoy). Penyaluran pembiayaan tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp51,10 triliun. Namun demikian, secara nominal penyaluran pembiayaan berdasarkan lokasi proyek lebih besar dibandingkan dengan berdasarkan lokasi bank. Hal mengindikasikan bahwa pembiayaan di Aceh masih mengandalkan sumber dana dari perbankan di luar Aceh.

Grafik 4. 6 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

(Berdasarkan Lokasi Proyek)



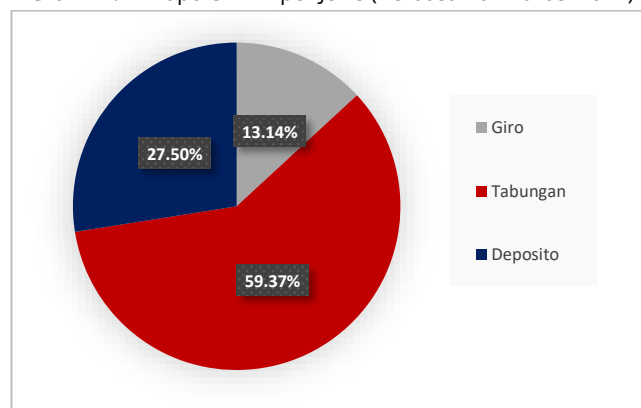
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2. Intermediasi Perbankan

4.2.1. DPK Menurut Jenisnya

Tabungan masih mendominasi komposisi DPK di Aceh. Pada periode laporan, DPK di Aceh didominasi tabungan dengan proporsi sebesar 59,37%, diikuti giro sebesar 13,14% dan deposito sebesar 27,50%. Secara nominal, total DPK pada triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp45,66 triliun, yang terdiri dari tabungan Rp27,11 triliun, giro sebesar Rp6,00 triliun, dan deposito Rp12,56 triliun.

Grafik 4. 7 Proporsi DPK per Jenis (Berdasarkan Lokasi Bank)

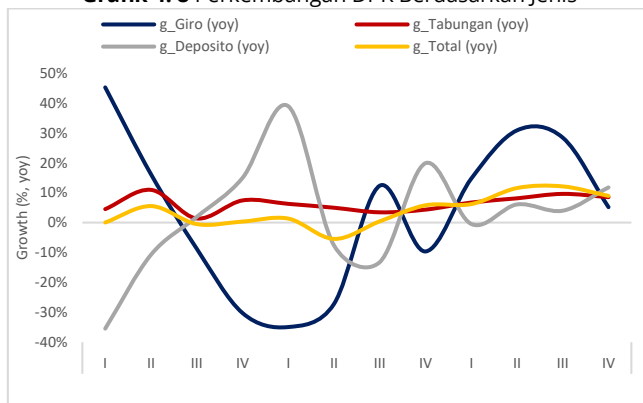


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pada triwulan laporan, hanya jenis DPK tabungan yang mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2024, giro dan tabungan merupakan komponen DPK yang mengalami perlambatan masing-masing sebesar 5,15% (yoy) dan 8,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 28,41% (yoy) dan 9,60% (yoy). Adapun deposito menjadi satu-satunya jenis DPK yang mengalami peningkatan sebesar 11,76% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,98%

(yoy).

Grafik 4. 8 Perkembangan DPK Berdasarkan Jenis

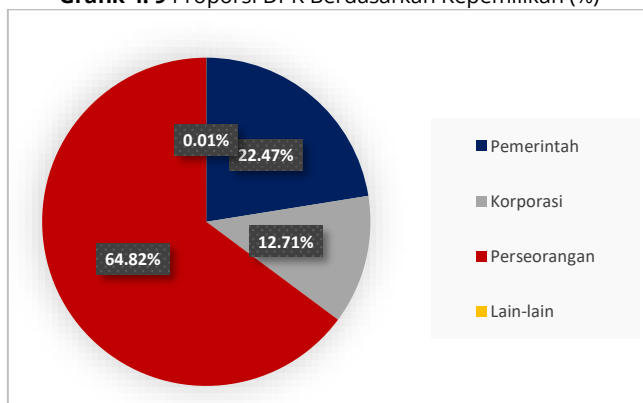


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.2.2. DPK Menurut Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, DPK di Aceh masih didominasi oleh kepemilikan perseorangan. DPK milik perseorangan memiliki porsi terbesar yaitu 64,82%. Sementara, DPK milik pemerintah dan korporasi berturut-turut memiliki porsi sebesar 22,47% dan 12,71%.

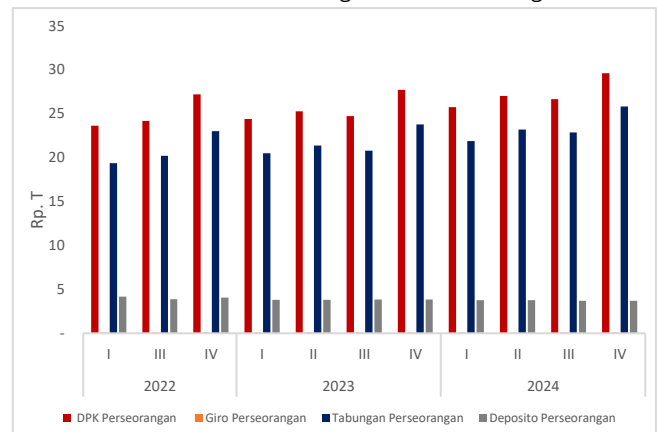
Grafik 4. 9 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan (%)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK perseorangan pada triwulan laporan terdiri dari tabungan memiliki porsi sebesar 87,16%, deposito memiliki porsi sebesar 12,54%, dan giro memiliki porsi sebesar 0,30%. Secara pertumbuhan, DPK perseorangan dalam bentuk tabungan mengalami peningkatan sebesar 8,58% (yoy). Sementara itu giro dan deposito mengalami kontraksi yang cukup dalam masing-masing 11,71% (yoy) dan 3,52% (yoy). Peningkatan tabungan mengindikasikan masyarakat cenderung membutuhkan dana dengan likuiditas yang tinggi seiring dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.

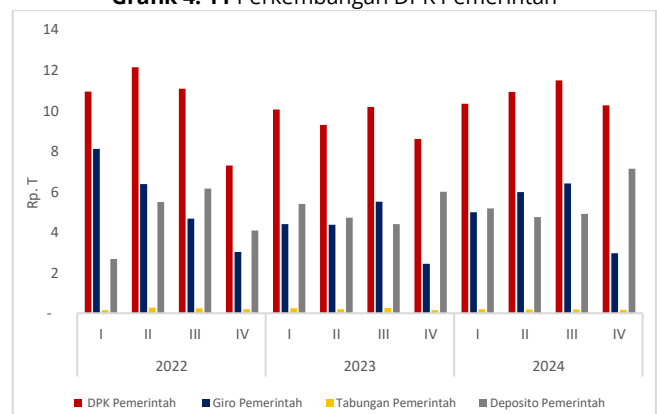
Grafik 4. 10 Perkembangan DPK Perseorangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Perkembangan DPK pemerintah pada triwulan laporan masih terjaga. Pada triwulan laporan, pertumbuhan DPK pemerintah mengalami pertumbuhan menjadi sebesar 19,39% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,88% (yoy). Pertumbuhan DPK pemerintah disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan giro sebesar 21,64% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 12,88%, pertumbuhan deposito sebesar 18,80% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 11,50% (yoy), serta peningkatan pada tabungan pemerintah sebesar 6,82% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 31,98% (yoy).

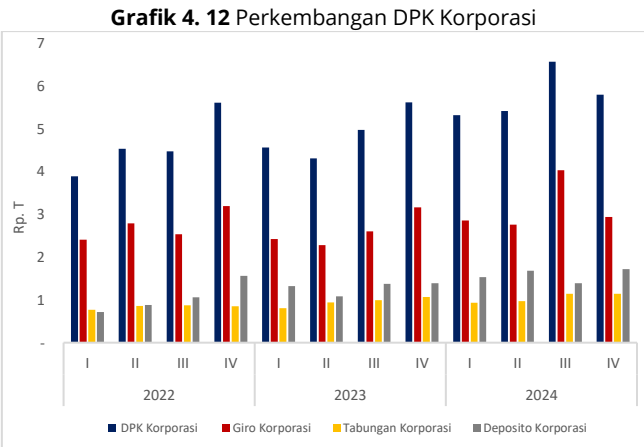
Grafik 4. 11 Perkembangan DPK Pemerintah



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

DPK korporasi masih didominasi oleh giro. Proporsi DPK korporasi pada triwulan laporan terdiri dari giro sebesar 50,71%, deposito sebesar 29,60%, dan tabungan sebesar 6,82%. Meskipun DPK korporasi jenis giro mendominasi, namun jenis giro mengalami kontraksi sebesar 7,04% (yoy), jauh

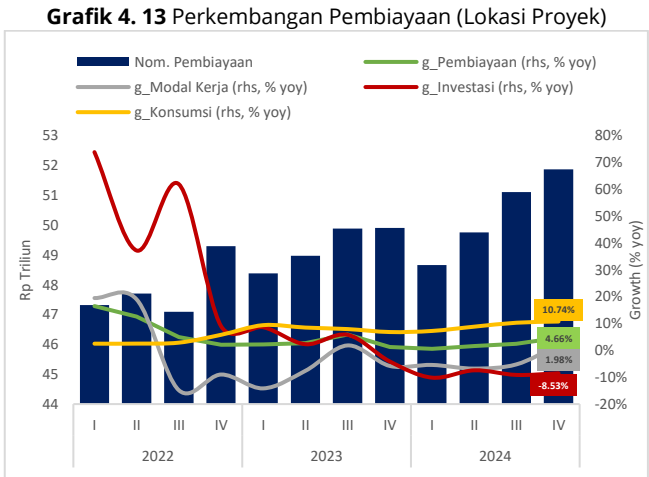
dari triwulan sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 55,11% (yoy). Sedangkan DPK jenis tabungan mengalami peningkatan sebesar 6,90% (yoy) dan DPK jenis deposito mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 23,72% (yoy) dari yang sebelumnya hanya tumbuh sebesar 0,88% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

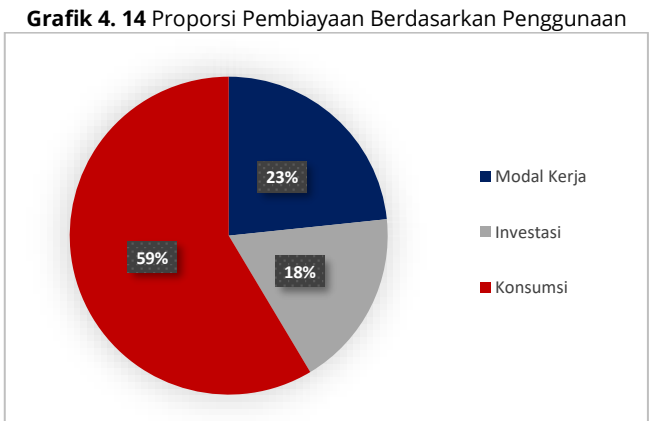
4.2.2. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2024 meningkat sebesar 4,66% (yoy). Adapun pembiayaan konsumsi masih mendominasi pembiayaan di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan sektor produktif perlu didorong, utamanya untuk lapangan usaha atau sektor prioritas agar dapat memberikan efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan pembiayaan di triwulan laporan didorong oleh jenis pembiayaan konsumsi dan modal kerja secara berturut-turut sebesar 10,74% (yoy) dan 1.98% (yoy). Sementara pembiayaan investasi masih mengalami kontraksi yaitu sebesar 8,53% (yoy).



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Nilai pembiayaan yang bersifat konsumtif memiliki proporsi sebesar 59%, sementara penyaluran pembiayaan di sektor produktif memiliki proporsi sebesar 41,00%. Adapun pembiayaan dari sektor produktif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan modal kerja, masing-masing memiliki porsi sebesar 18,00% dan 23,00% dari total pembiayaan pada triwulan laporan. Penyaluran pembiayaan di Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan konsumsi yang menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

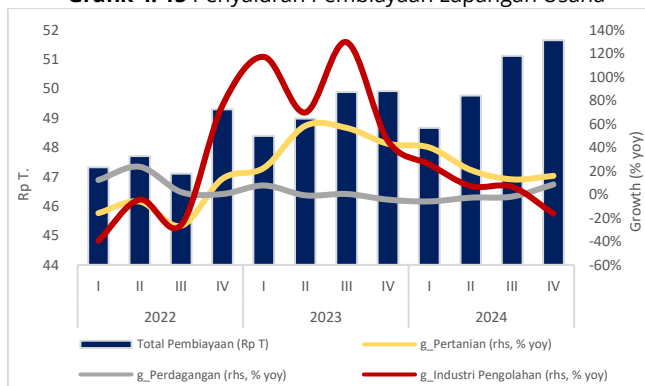
Peningkatan pembiayaan konsumsi sejalan dengan membaiknya aktivitas konsumsi yang dikonfirmasi oleh hasil Survei Konsumen yang berada pada zona optimis. Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Aceh mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis hingga bulan Desember 2024. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan September 2024 tercatat terjaga optimis

sebesar 122,95 lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 114,71.

4.2.3. Pembiayaan Menurut Lapangan Usaha (LU)

Pangsa pembiayaan terbesar menurut lapangan usaha didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pada triwulan IV 2024, porsi pembiayaan terhadap LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat 13,32%. Kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Perdagangan Besar dan Eceran mengalami peningkatan sebesar 8,41% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,91% (yoy). Sementara itu, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan memiliki porsi pembiayaan masing-masing sebesar 9,24% dan 6,24%. Pada triwulan IV 2024, kinerja pembiayaan yang disalurkan ke LU Pertanian tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,24% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,93% (yoy). Sedangkan LU Industri Pengolahan mengalami perlambatan sebesar 6,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 8,26% (yoy).

Grafik 4. 15 Penyaluran Pembiayaan Lapangan Usaha



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

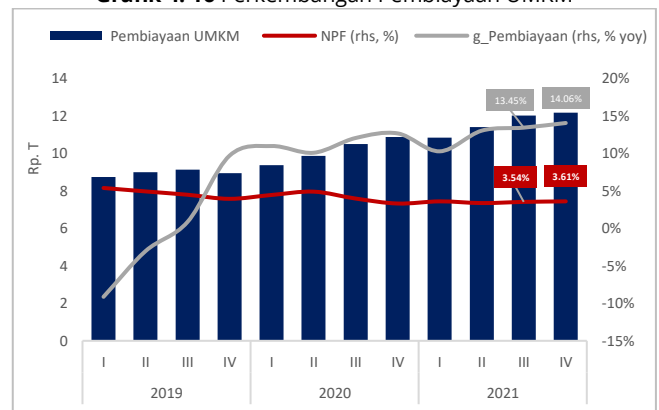
4.2.4. Pembiayaan UMKM

Kinerja pembiayaan UMKM pada triwulan IV 2024 mengalami perlambatan, walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Kinerja pembiayaan yang disalurkan kepada sektor UMKM di Aceh tercatat sebesar 14,51% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,57% (yoy). Namun demikian, secara nominal pembiayaan UMKM pada triwulan IV mengalami peningkatan sebesar Rp12,02 triliun, lebih tinggi

dari triwulan sebelumnya sebesar Rp11,40 triliun. Adapun rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan UMKM adalah sebesar 3,54%. Sementara itu, rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan di Aceh pada triwulan IV 2024 sebesar 28,27%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan inklusi pembiayaan di Aceh.

Bank Indonesia terus mendorong realisasi penyaluran pembiayaan UMKM. Hal ini dilakukan dengan menetapkan target proporsi pembiayaan UMKM perbankan berdasarkan tahapan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.24/3/PBI/2022. Selain itu, Bank Indonesia juga berupaya mendorong peningkatan kinerja pembiayaan/kredit UMKM melalui penerbitan kebijakan insentif seperti memperlonggar batasan *Loan to Funding Ratio* sebagaimana diatur dalam PBI No. 24/4/PBI/2022. Sementara itu, di tingkat regional Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan di seluruh wilayah Indonesia juga turut mendorong kinerja UMKM melalui berbagai program pendampingan.

Grafik 4. 16 Perkembangan Pembiayaan UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah.

4.3. Strategi dalam Mendorong Penyaluran Pembiayaan UMKM di Aceh

KPw BI Provinsi Aceh melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. KPw BI Provinsi Aceh secara konsisten terus mendorong peningkatan akses keuangan UMKM

untuk mendukung optimalisasi pembiayaan di daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM diantaranya melalui program pengembangan UMKM seperti pendampingan dan pelatihan pembuatan laporan keuangan melalui optimalisasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID), dan fasilitasi perluasan akses pasar maupun promosi perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu upaya dalam peningkatan akses pembiayaan UMKM, KPw BI Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan Meuseuraya Festival. Kegiatan tersebut menghasilkan *business matching* pembiayaan mencapai Rp8,6 miliar dengan melibatkan 4 (empat) perbankan dan 35 UMKM.

Di samping itu, KPw BI Provinsi Aceh menyelenggarakan program pengembangan kapasitas wirausaha melalui Program Pengembangan Wirausaha Unggulan Bank Indonesia (WUBI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja wirausaha di Aceh sehingga dapat naik kelas, terutama bagi wirausaha yang mendukung program pengendalian inflasi Bank Indonesia. Di samping itu, program WUBI ditujukan untuk mendorong ekspor atau substitusi impor, pariwisata, serta mendukung ekonomi dan keuangan syariah, dan mengembangkan produk dan jasa unggulan daerah. Lebih lanjut, melalui program WUBI dapat menciptakan ekosistem wirausaha di Aceh yang mendukung upaya percepatan pengembangan usaha sehingga memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan perekonomian daerah.



BAB V

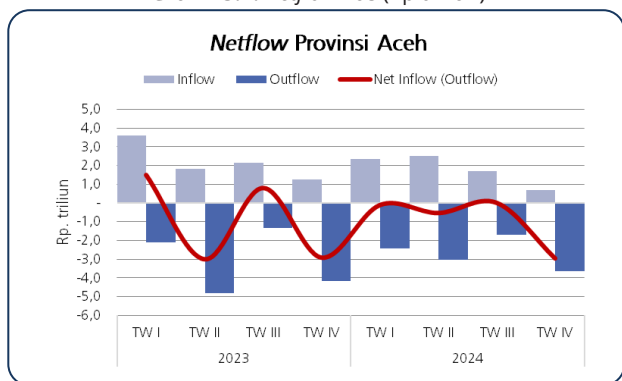
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan IV 2024, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendorong perekonomian Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, dimana terjadi *net outflow* pada triwulan laporan. Sistem pembayaran non tunai nilai besar mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, penggunaan kartu debit, uang elektronik, dan QRIS terus menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

5.1. Sistem Pembayaran Tunai

Pada triwulan IV 2024, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia mengalami *net outflow*. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia di Aceh mengalami *net outflow* sebesar Rp3 triliun dengan komposisi total uang kartal masuk (*inflow*) sebesar Rp0,7 triliun dan total uang kartal keluar (*outflow*) sebesar Rp3,6 triliun (Grafik 5.1). *Net outflow* pada triwulan laporan mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat di Aceh terhadap uang kartal masih cenderung tinggi. Hal ini, secara tidak langsung dipengaruhi oleh efektivitas program perluasan akseptansi pembayaran digital oleh bank lokal.

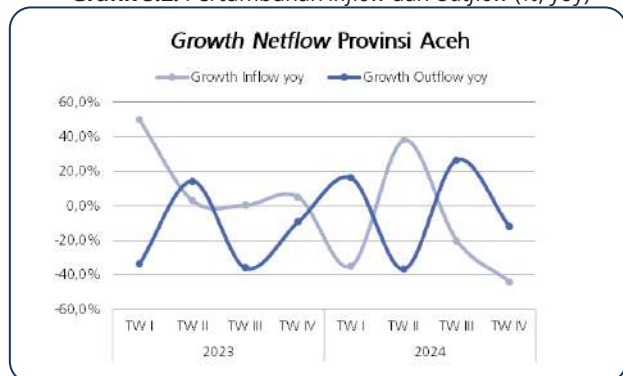
Grafik 5.1. Netflow Kas (Rp triliun)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara tahunan, tingkat *outflow* pada triwulan IV 2024 berkontraksi sebesar 12,3% (yoy) sedangkan *inflow* berkontraksi sebesar 44,2% (yoy) (Grafik 5.2). Secara keseluruhan, peredaran uang kartal mengalami penurunan karena adanya peningkatan transaksi non tunai.

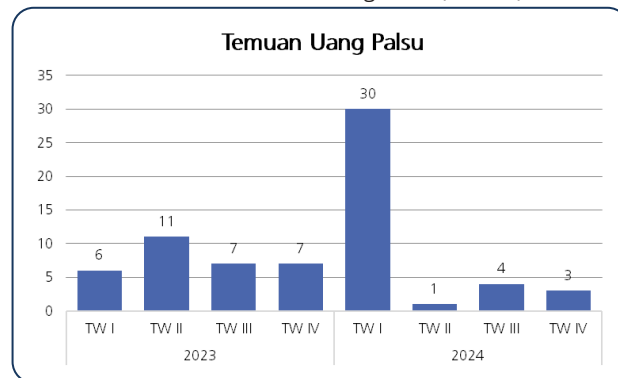
Grafik 5.2. Pertumbuhan Inflow dan Outflow (% yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kualitas peredaran uang kartal tetap terjaga. Temuan uang yang diragukan keasliannya (palsu) pada triwulan laporan tercatat turun dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebanyak 3 lembar (Grafik 5.3).

Grafik 5.3. Temuan Uang Palsu (lembar)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

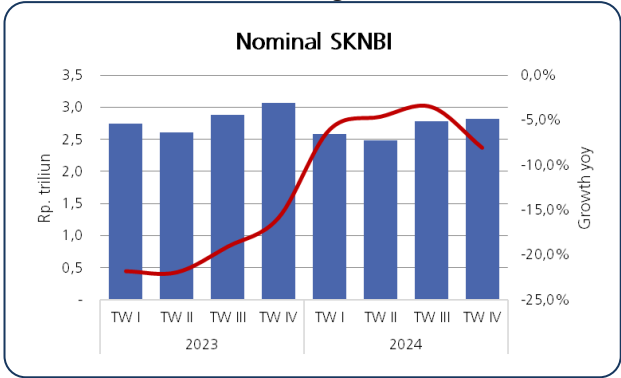
5.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai, baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri, menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Sistem pembayaran nilai besar dan nilai ritel yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya baik dari sisi nominal maupun volume. Sementara itu, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri menggunakan instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit/ATM tercatat mengalami pertumbuhan secara agregat dalam transaksi. Begitu juga dengan penggunaan instrumen Uang Elektronik (UE), baik *server based* ataupun *chip based* di Aceh tercatat mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Secara umum, sistem pembayaran non tunai di Aceh tetap terselenggara dengan baik dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi masyarakat.

Transaksi sistem pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2024 naik 1,3% (qtoq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Nominal penyelesaian transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan berkontraksi sebesar 8,1% (yoy) atau sebesar Rp2,8

triliun dari Rp3,1 triliun pada triwulan IV 2023 (Grafik 5.4).

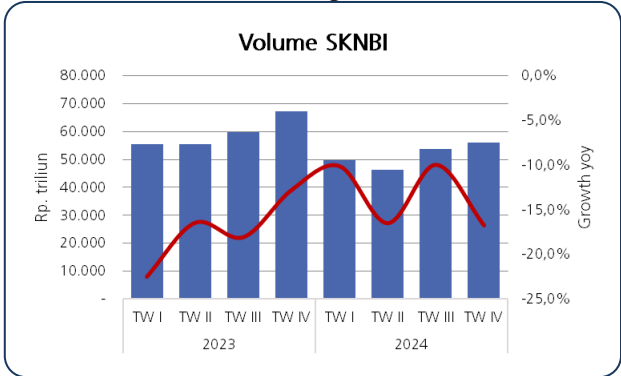
Grafik 5.4. Perkembangan Nominal SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi ritel melalui SKNBI pada triwulan laporan naik 3,9% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi SKNBI pada triwulan laporan tercatat sebanyak 55.933 transaksi atau terkontraksi sebesar 16,8% (yoy) dari 67.217 transaksi pada triwulan IV 2023 (Grafik 5.5).

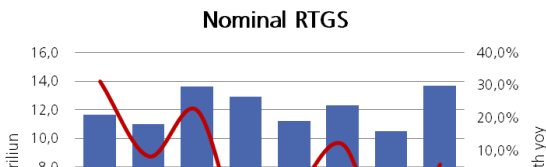
Grafik 5.5. Perkembangan Volume SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perkembangan sistem pembayaran nilai besar dalam Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS) secara nominal tercatat meningkat pada triwulan laporan. Transaksi BI-RTGS secara nominal tercatat sebesar Rp13,7 triliun atau naik sebesar 5,9% (yoy) dari Rp12,9 triliun pada triwulan IV 2023. Sejalan dengan kenaikan yoy, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan naik sebesar 30,2% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 5.6).

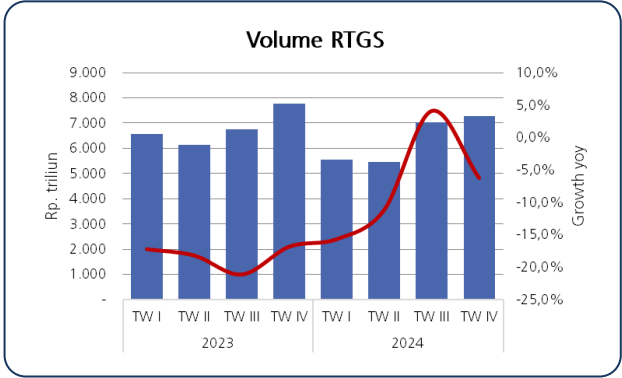
Grafik 5.6. Perkembangan Nominal BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan naik 3,6% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi BI-RTGS pada triwulan laporan tercatat sebanyak 7.276 transaksi atau terkontraksi sebesar 6,2% (yoy) dari 7.758 transaksi pada triwulan IV 2023 (Grafik 5.7).

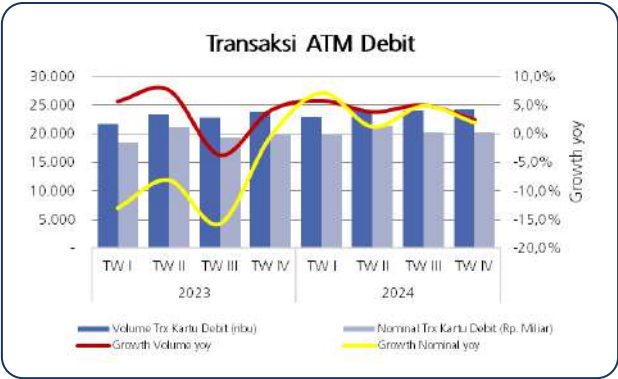
Grafik 5.7. Perkembangan Volume BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Selanjutnya, kartu ATM debit mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi pada triwulan laporan tercatat meningkat sebesar 2,4% (yoy) menjadi 24 juta transaksi. Sementara nominal transaksi kartu ATM debit tercatat sebesar Rp20,2 Triliun atau tumbuh sebesar 1,9% (yoy) (Grafik 5.8).

Grafik 5.8. Transaksi ATM Debit

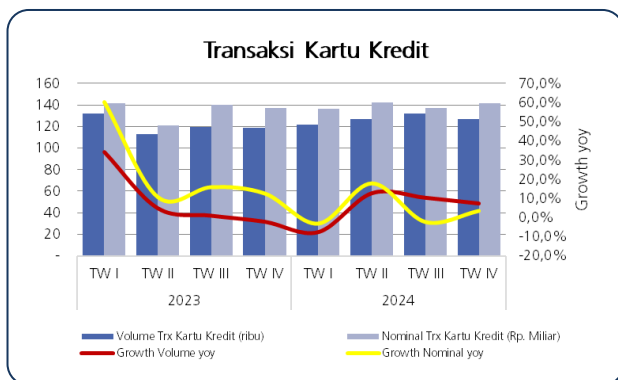


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara itu dari sisi kartu kredit juga mengalami pertumbuhan pada triwulan laporan. Volume transaksi naik sebesar 7,3% (yoy) atau menjadi sebesar 127 ribu transaksi (Grafik 5.9). Secara nominal, pada triwulan laporan transaksi kartu kredit tercatat sebesar Rp141 miliar atau naik sebesar 3,3% (yoy).

Selama triwulan IV 2024, transaksi kartu kredit mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan nominal mencapai Rp38 miliar atau 96,3% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 34.361 transaksi atau 96,61% dari total volume transaksi.

Grafik 5.9. Transaksi Kartu Kredit



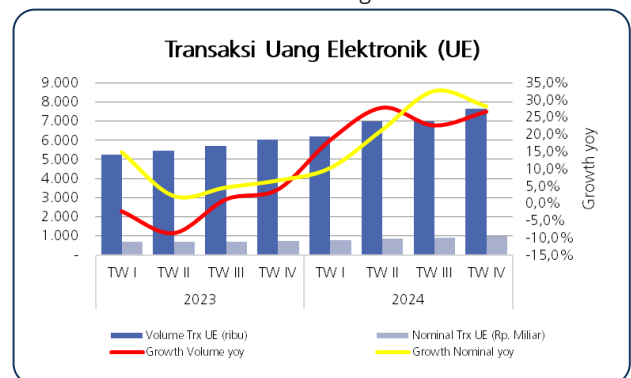
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Seiring dengan meningkatnya *awareness* masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran non tunai, perkembangan transaksi menggunakan UE terus mengalami peningkatan. Transaksi UE secara nominal pada triwulan IV 2024 mencapai Rp963 miliar atau naik sebesar 28,2% (yoy). Sementara volume transaksi UE naik sebesar 26,5% (yoy) atau sebanyak 7,6 juta transaksi selama triwulan IV 2024 (Grafik 5.10). Tren transaksi UE yang relatif terus meningkat mengindikasikan semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan UE baik dari sisi konsumen maupun *merchant*. Implementasi berbagai program elektronifikasi oleh Pemda juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah transaksi UE. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat yang tinggi dalam menggunakan instrumen UE juga diiringi dengan peningkatan infrastruktur penerima pembayaran UE baik *chip based* ataupun *server based*. Peningkatan ini juga selaras dengan semakin tingginya intensitas

penggunaan UE dalam aktivitas belanja masyarakat melalui *platform e-commerce*. Selama triwulan IV 2024, transaksi UE mayoritas didominasi untuk keperluan belanja dengan jumlah nominal mencapai Rp228 miliar atau 68,9% dari total nominal transaksi dan volume sebanyak 2,1 juta transaksi atau 81,3% dari total volume transaksi.

Transaksi UE berbasis server (*server based*) juga mengalami kenaikan di Aceh. Pemanfaatan salah satu metode pembayaran digital berbasis server yaitu melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) mengalami peningkatan yang terlihat dari perkembangan jumlah *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS. Peningkatan ini didorong oleh *awareness* masyarakat yang semakin tinggi dalam memanfaatkan fitur pembayaran yang bersifat *contactless*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa *demand* masyarakat untuk melakukan *contactless payment* semakin tinggi.

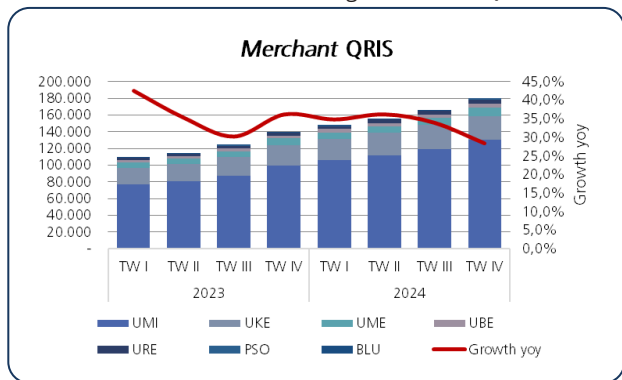
Grafik 5.10. Perkembangan Transaksi UE



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Hingga triwulan IV 2024, terdapat 178.926 *merchant* yang telah mengimplementasikan QRIS sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non tunai (Grafik 5.11). Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 28,5% (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 139.300 *merchant*. Secara triwulanan, jumlah *merchant* meningkat sebesar 8,0% (qoq) dari posisi triwulan sebelumnya sebanyak 165.614 *merchant*. Berdasarkan klasifikasi usaha yang telah mengimplementasikan QRIS, *share* terbesar dimiliki oleh usaha mikro (UMI) sebanyak 130.607 *merchant* (72,9%).

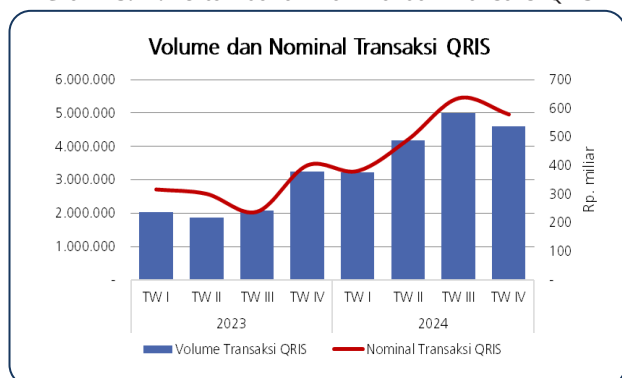
Grafik 5.11. Perkembangan Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sementara dari sisi jumlah pengguna, hingga triwulan IV 2024 telah terdapat 658.721 pengguna atau bertambah sebanyak 32.568 selama triwulan laporan. Dari sisi volume transaksi, pada triwulan IV 2024 terdapat 4,6 juta transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp579,9 miliar (Grafik 5.12).

Grafik 5.12. Pertumbuhan Nominal dan Transaksi QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

5.3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Dalam rangka mewujudkan nilai tukar yang stabil guna mendukung terciptanya iklim stabilitas moneter, Bank Indonesia memandang perlunya regulasi yang mengatur pasar keuangan termasuk pasar keuangan valuta asing (valas). Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang menjamin terciptanya pasar keuangan valas yang sehat, profesional, dan menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Hingga triwulan IV 2024, terdapat 13 (tiga belas) KUPVA BB berizin di Aceh yang melayani pembelian

maupun penjualan Uang Kertas Asing (UKA). Sebanyak 5 (lima) KUPVA BB beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, sementara 8 (delapan) lainnya beroperasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Pada triwulan laporan, transaksi KUPVA BB berizin di Aceh meningkat jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan meningkat sebesar 75,83% (yoy) menjadi Rp18,23 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,37 miliar.

Berdasarkan jenis transaksi, pembelian UKA pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 80,29% (yoy) menjadi Rp8,85 miliar dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,91 miliar. Sejalan dengan hal tersebut penjualan UKA pada triwulan laporan juga mengalami peningkatan sebesar 71,82% (yoy) menjadi Rp9,38 miliar dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,46 miliar (Grafik 5.13).

Grafik 5.13. Transaksi KUPVA BB



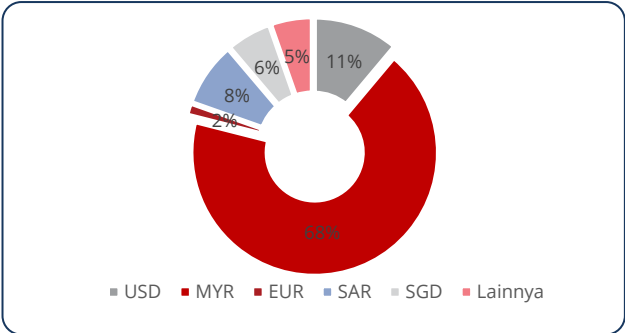
Sumber: LKPBU, diolah

Pada tanggal 29 September 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Aceh dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau *Visa on Arrival* (VoA) yang menjadi tanda kembali dibukanya rute penerbangan Internasional. Sebelumnya dalam menyelenggarakan VoA di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Hukum & HAM hanya bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), akan tetapi pasca qanun LKS yang diterapkan di

Aceh mengakibatkan BRI tidak lagi dapat memberikan layanan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh. Kesiapan mekanisme VoA di Bandara SIM akan mempermudah proses perizinan dari wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh.

Sejalan dengan telah dibukanya VoA di Bandara SIM, saat ini telah terdapat tiga maskapai penerbangan yang membuka rute internasionalnya di Aceh. Air Asia menjadi maskapai pertama yang membuka rute internasional pasca pandemi Covid-19. Pada 3 Oktober 2022 Air Asia resmi membuka kembali rute Aceh – Kuala Lumpur, dan disusul oleh Batik Air dan Fire Fly yang membuka rute Aceh – Penang. Dan saat ini rute Air Asia dari/ke Kuala Lumpur telah terbang secara reguler setiap harinya. Terakhir Super Air Jet juga telah membuka rute dari/ke Kuala Lumpur.

Grafik 5.14. Disagregasi Transaksi UKA



Sumber: LKPBU, diolah

Kedepannya transaksi penukaran UKA diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kembali dibukanya rute penerbangan Internasional oleh beberapa maskapai penerbangan internasional.

Berdasarkan jenis UKA yang diperdagangkan, transaksi KUPVA BB pada triwulan laporan didominasi oleh UKA Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 67,85% dan Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar 11,11% (Grafik 5.14). Dominasi UKA tersebut tidak terlepas dari faktor ekspor impor, pariwisata, pendidikan, dan remitansi TKA yang mendorong terjadinya permintaan dan penawaran terhadap UKA di Aceh.

Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyelenggarakan *capacity building* sosialisasi dan monitoring perluasan penyaluran

kepada seluruh pedagang valuta asing berizin di Aceh. Tujuan dari *capacity building* ini adalah agar seluruh pedagang valuta asing dapat lebih memahami potensi penyalahgunaan valuta asing baik sebagai sarana pencucian uang ataupun pendanaan terorisme sekaligus menjalankan langkah mitigasi risiko tersebut. Selain itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan melalui Sistem Informasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan memahami secara lebih dalam terkait risiko yang ada dan bagaimana mekanisme pelaporannya, diharapkan kewaspadaan setiap pedagang valuta asing akan lebih meningkat utamanya mengenai profil *customer*.

5.4. Penyaluran Program Sembako dan PKH

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan transformasi penyaluran bantuan sosial, dari tunai menjadi non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Jenis bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan atau disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS yang juga dikenal dengan Kartu Kombo merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan oleh KPM dalam menerima bantuan sosial. Dengan demikian, KPM yang selama ini tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal telah berubah statusnya menjadi *bankable*.

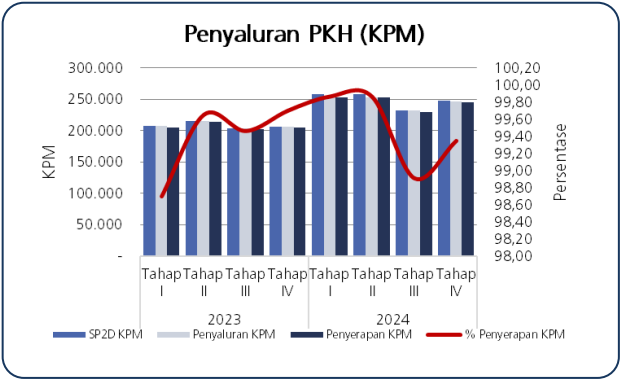
Dalam rangka mendukung kesuksesan perluasan implementasi penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Bank Indonesia juga senantiasa melakukan

bantuan sosial non tunai di Aceh. Adapun kegiatan

monitoring dilaksanakan melalui pemantauan data secara *off site* maupun *on site* terhadap efektivitas/keandalan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan dalam penyaluran BSNT.

PKH disalurkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat miskin di masa pandemi. Pada triwulan laporan, bantuan PKH Tahap IV tahun 2024 di Aceh telah disalurkan sebesar 99,86% kepada KPM (Grafik 5.15). Jumlah KPM yang telah melakukan penyerapan untuk Tahap IV tercatat sebanyak 245.529 atau telah mencapai 99,35% dari target jumlah penerima sebanyak 247.470 KPM.

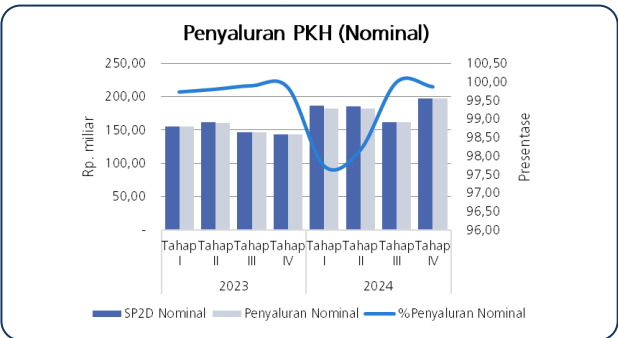
Grafik 5.15. Perkembangan Penyaluran PKH (KPM)



Sumber: Himbara, diolah

Di sisi nominal, jumlah bantuan per tahap yang disalurkan selalu berfluktuasi menyesuaikan dengan data KPM yang dimutakhirkan secara berkala oleh Kemensos RI. Pada Tahap IV 2024, nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp196,9 miliar dengan persentase nominal penyaluran PKH telah mencapai 99,87% (Grafik 5.16). Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Tahap III 2024 yaitu sebesar Rp162,1 miliar.

Grafik 5.16. Perkembangan Penyaluran PKH (Nominal)



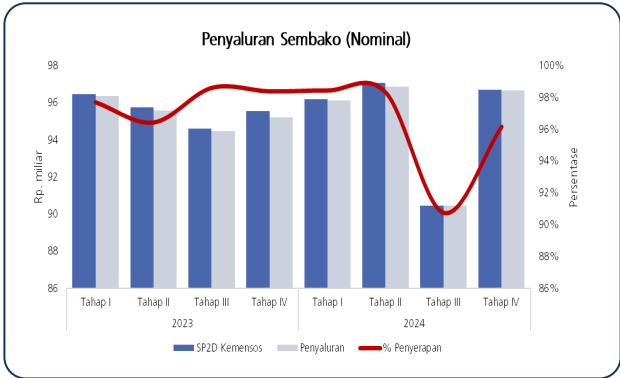
Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, penyaluran bantuan Program

Sembako telah diperluas ke seluruh Kab/Kota di Provinsi Aceh. Nilai bantuan program sembako yang diterima masyarakat pada awalnya ditetapkan sebesar Rp150.000,-/bulan/KPM. Namun berdasarkan keputusan Presiden dalam rapat terbatas penanggulangan pandemi Covid-19, nilai bantuan dinaikkan menjadi Rp200.000,- /bulan/KPM hingga triwulan laporan. Harapannya keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan konsumsi paska pandemi Covid-19.

Pada Tahap IV 2024, nominal bantuan yang disalurkan Program Sembako sebesar Rp96,7 miliar dengan persentase nominal penyaluran Program Sembako telah mencapai 96,1% (Grafik 5.17). Jumlah tersebut naik dibandingkan Tahap III 2024 sebesar Rp90,4 miliar.

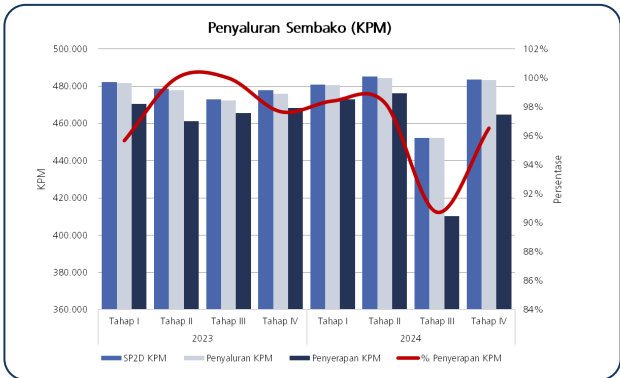
Grafik 5.17. Perkembangan Program Sembako (Nominal)



Sumber: Himbara, diolah

Sementara itu, jumlah KPM program sembako pada triwulan laporan naik menjadi 483 ribu KPM dari jumlah KPM Tahap III 2024 sebanyak 452 ribu KPM (Grafik 5.18).

Grafik 5.18. Perkembangan Program Sembako (KPM)



Sumber: Himbara, diolah



BAB VI

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan penurunan persentase. Namun demikian, dibandingkan dengan seluruh provinsi di Sumatera, TPT Aceh masih berada pada urutan ketiga tertinggi, sedangkan kemiskinan masih berada pada peringkat pertama.

6.1. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2024 tercatat 5,75%, mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,03%. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,11%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,77%. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan dalam memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

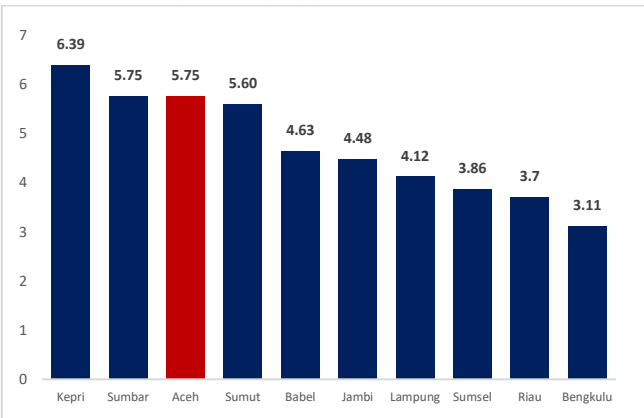
Tabel 6. 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TINGKAT PENGANGGURAN %	
	
Agustus 2023	6,03%
Agustus 2024	5,75%

Sumber: BPS, diolah

Penurunan TPT disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja yang disertai dengan peningkatan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan Angkatan kerja, yaitu mencapai 2,6 juta orang (65,11%).

Grafik. 6.1 Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, TPT di Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang sama seperti Sumatera Barat.

Penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh turut didukung oleh berbagai faktor, termasuk pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024. Kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan peluang kerja di sektor konstruksi untuk pembangunan dan perbaikan *venue* pertandingan, serta sektor pendukung lainnya. Penurunan ini juga merupakan hasil dari berbagai upaya yang terintegrasi, seperti program pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Tabel 6. 2. Perkembangan TPT

PENGANGGURAN	2023	2024
	Agustus	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja (orang, dalam ribuan)		
Bekerja	2.604	2.661
Pengangguran	157	153
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
Persentase TPAK (%)	64,77	65,11
Tingkat Pengangguran Terbuka		
TPT (%)	6,03	5,75

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

SEKTOR	Agustus 2024 (%)
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	37,92
Perdagangan Besar & Eceran	15,32
Industri Pengolahan	7,23
Konstruksi	7,15
Jasa Pendidikan	7,13
Administrasi Pemerintahan	6,39
Akomodasi dan Makan Minum	5,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	2,53

Sumber: BPS, diolah

LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dengan porsi terbesar, yaitu mencapai 37,92%. Selanjutnya diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran (15,32%), Industri Pengolahan (7,23%), Konstruksi

(7,15%), dan Jasa Pendidikan (7,13%).

Tenaga kerja di Provinsi Aceh saat ini didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebesar 34,62%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan SD ke Bawah sebesar 24,90%, SMP sebesar 18,65%, perguruan tinggi sebesar 14,18%, SMK sebesar 4,29%, dan diploma sebesar 3,36%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2023.

Tabel 6.4. Tenaga Kerja Menurut Pendidikan (%)

Pendidikan Tertinggi	Agustus	Agustus
	2023	2024
Sekolah Menengah Atas	32,65	34,62
Sekolah Dasar ke Bawah	26,08	24,90
Sekolah Menengah Pertama	19,92	18,65
Diploma IV, S1, S2, S3	13,13	14,18
Sekolah Menengah Kejuruan	4,69	4,29
Diploma I/II/III	3,53	3,36

Sumber: BPS, diolah

Tenaga kerja berdasarkan pekerjaan didominasi status pekerjaan Buruh/Karyawan/Pegawai dengan porsi sebesar 35,65%. Sementara itu, status pekerjaan dengan porsi terkecil, yaitu berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar sebanyak 4,18%. Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka yang Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan Buruh/Karyawan/Pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal. Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 60,17%, sedangkan kegiatan formal sebanyak 39,83%. Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 0,31% dan pada

kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,31%.

Tabel 6.5. Tenaga Kerja Berdasarkan Pekerjaan

Status Pekerjaan	Agustus	Agustus
	2023	2024
	Porsi (%)	Porsi (%)
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,92%	35,65
Berusaha Sendiri	25,61%	25,73%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	13,21%	12,96%
Pekerja Keluarga	11,58%	11,13%
Pekerja bebas di pertanian	4,79%	5,30%
Pekerja bebas di nonpertanian	4,67%	5,05%
Berusaha dibantu buruh tetap	4,22%	4,18%

Sumber: BPS, diolah

Nilai Tukar Petani⁴ (NTP) Provinsi Aceh pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Pada triwulan IV 2024, NTP tercatat sebesar 122,24 atau mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 121,52. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat daya beli petani. NTP yang melampaui 100 menunjukkan bahwa penerimaan petani terhadap hasil produksi produksi lebih tinggi dibandingkan pengeluaran petani. Pada bulan Desember 2024, Peningkatan NTP terjadi di Subsektor Tanaman Pangan (NTPP), Subsektor Hortikultura (NTPH), Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR), dan Subsektor Perikanan (NTPN).

Tabel 6.6. Nilai Tukar Petani



NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Triwulan III 2024	121,52
Triwulan IV 2024	122,24 ▲

Sumber: BPS, diolah

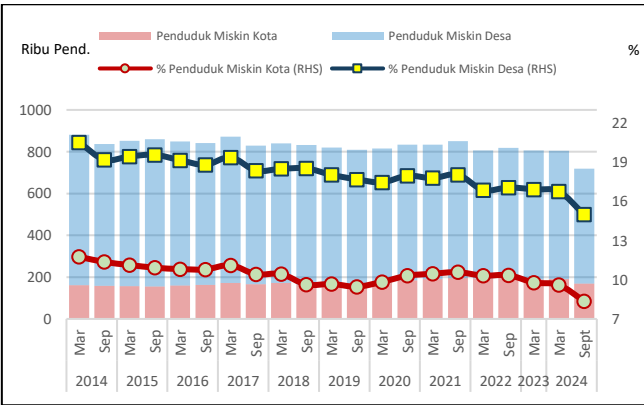
⁴ Rasio antara indeks harga diterima dan harga dibayar petani

6.2. Kemiskinan

Berdasarkan data terakhir, persentase kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar 12,64%, menurun 1,59% poin dibandingkan Maret 2024 sebesar 14,23%. Penurunan tersebut menjadi pencapaian tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Penurunan persentase penduduk miskin didorong oleh penurunan kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan, di mana persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan menurun masing-masing dari 16,75% dan 9,60% pada Maret 2024, menjadi 14,99% dan 8,37% pada September 2024.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada posisi September 2024 sebanyak 718,96 ribu jiwa, lebih rendah dibandingkan periode Maret 2024 sebanyak 804,53 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 10,38% dari sebelumnya 613,98 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 550,25 ribu jiwa pada September 2024. Penurunan penduduk miskin turut dialami wilayah perkotaan dengan penurunan sebesar 11,46% dari sebelumnya 190,55 ribu jiwa pada Maret 2024 menjadi 168,71 ribu jiwa pada September 2024.

Grafik 6.2. Jumlah Penduduk Miskin Desa dan Kota



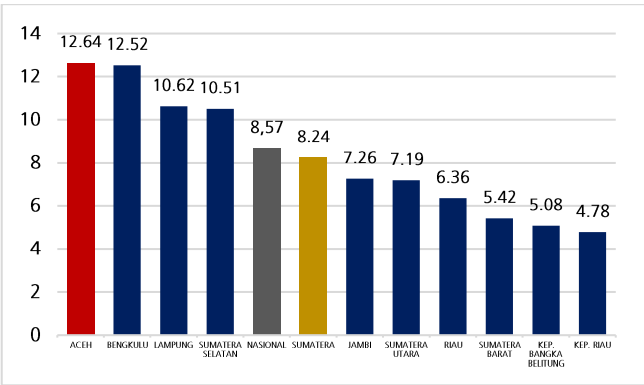
Sumber: BPS, diolah
*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia per Desember 2024, Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan masih berada di atas 100, yaitu 121,9 dan 110,1. Hal ini mengindikasikan masyarakat optimis akan

pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan di saat ini.

Data tingkat kemiskinan pada September 2024 menunjukkan Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera dengan persentase sebesar 12,64%. Nilai tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat kemiskinan di Sumatera (8,24%) dan Nasional (8,57%).

Grafik 6.3. Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera (%)



Sumber: BPS, diolah

Penurunan persentase kemiskinan juga turut memengaruhi sebaran garis kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil survei di Provinsi Aceh, garis kemiskinan pada Maret 2024 dibandingkan dengan September 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,7%, sehingga pendapatan per kapita perbulan yang semula Rp661.227,- menjadi Rp665.855,- per kapita per bulan. Kontribusi komponen makanan masih memberikan andil terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan di September 2024 yakni sebesar Rp506.089,- per kapita per bulan sementara komponen bukan makanan sebesar Rp159.766,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa komponen terbesar pembentuk Garis Kemiskinan adalah komoditas makanan dengan sumbangan sebesar 75,02% di perkotaan dan 76,63% di perdesaan. Beberapa komoditas utama yang memberikan sumbangan besar terhadap kenaikan garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras, rokok kretek filter, tongkol/tuna/cakalang, dan telur ayam. Sementara peranan

komoditas bukan makanan berkontribusi sebesar 24,98% di perkotaan dan 23,37% di perdesaan dengan komoditas yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan yaitu seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut dengan P1 dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut dengan P2.

Tabel 6.7. Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan

KEMISKINAN (%)		
MARET 2024	14,23	▼
SEPTEMBER 2024	12,64	
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)		
MARET 2024	2,620	▼
SEPTEMBER 2024	1,951	
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)		
MARET 2024	0,712	▼
SEPTEMBER 2024	0,470	

Sumber: Data BPS, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) pada periode September 2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. P1 mengalami penurunan dari 2,620 pada Maret 2024 menjadi 1,951 pada September 2024. Begitu pula dengan P2 yang mengalami penurunan setelah sebelumnya 0,712 pada Maret 2024 menjadi 0,470 pada September 2024. Turunnya nilai Indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan kondisi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung semakin menyempit.

Tabel 6.8. Indeks Kemiskinan (P1 dan P2)

Daerah	2024	2024
	MARET	SEPTEMBER

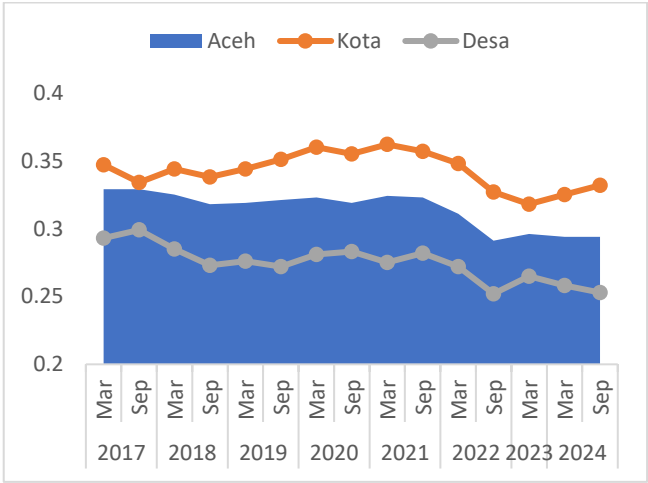
⁵Nilai Rasio Gini berkisar antara 0-1.Semakin besar nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi

	P1	P2	P1	P2
Perkotaan	1,581	0,401	0,945	0,275
Perdesaan	3,182	0,881	2,503	0,633
Gabungan	2,620	0,712	1,951	0,470

Sumber: Data BPS, diolah

Dalam pengukuran ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk, digunakan indikator Rasio Gini⁵. Berdasarkan daerah, Rasio Gini pada perkotaan pada September 2024 sebesar 0,332, sedangkan pada perdesaan sebesar 0,253. Terjadi peningkatan rasio di perkotaan dan penurunan rasio di perdesaan pada periode September 2024 dibandingkan Maret 2024. Rasio Gini di Provinsi Aceh secara keseluruhan menunjukkan angka yang stabil di 0,294 pada September 2024 maupun di semester sebelumnya, yakni Maret 2024. Sedangkan, jika dibandingkan dengan rasio gini Provinsi Aceh September 2022, terjadi peningkatan dari 0,291 menjadi 0,294 di September 2024.

Grafik 6.4. Perkembangan Rasio Gini di Provinsi Aceh Menurut Daerah



Sumber: BPS, diolah

*September 2023 tidak dilakukan penghitungan kemiskinan



BAB VII

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,8%-4,2% (yoy) atau melambat dibandingkan angka pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pada ekonomi global. Hal ini utamanya terkait berlanjutnya perang dagang akibat kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat, serta tingginya potensi konflik geopolitik berkelanjutan.

7.1. Prospek Makroekonomi

Di sisi global, kinerja pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh stabil dibandingkan tahun 2024. Berdasarkan “*World Economic Outlook: Divergent and Uncertain*” oleh International Monetary Fund (IMF) pada bulan Januari 2025, perekonomian global tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,3% (yoy) (Tabel 7.1). Secara umum, angka pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 tidak banyak berubah dibandingkan angka proyeksi sebelumnya sebesar 3,2% (yoy) pada “*World Economic Outlook: Policy Pivot, Rising Threats*” Edisi Oktober 2024. Angka proyeksi ini telah mempertimbangkan potensi perubahan arah pertumbuhan dan penyesuaian proyeksi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara anggota *Eurozone*, dan Cina.

Tabel 7.1 Angka Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia di Tahun 2025 (%yoy)

Wilayah	Oct '24	Jan '25*
World Output	3,2	3,3
Advance Economies	1,8	1,9
United States	2,2	2,7
Euro Area	1,2	1,0
Japan	1,1	1,1
United Kingdom	1,5	1,6
Emerging Market	4,2	4,2
China	4,5	4,6
India	6,5	6,5

Sumber: International Monetary Fund (IMF)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk Amerika Serikat di tahun 2025 meningkat dari proyeksi sebelumnya pada bulan Oktober 2024 sebesar 2,2% (yoy) menjadi 2,7% (yoy) pada Januari 2025. Tetapi ini mengimbangi penurunan proyeksi untuk negara-negara maju lainnya, terutama pada negara anggota *Eurozone*, dari angka 1,2% (yoy) menjadi 1,0% (yoy). Penurunan angka proyeksi pada negara-negara Eropa disebabkan oleh melemahnya kapasitas sektor industri dan meningkatnya tensi geopolitik. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina di tahun 2025 mengalami penyesuaian keatas

dari angka 4,5% (yoy) menjadi 4,6% (yoy). Penyesuaian minor ini dikarenakan oleh kebijakan paket fiskal yang diumumkan oleh pemerintah RRC pada bulan November 2024. Proyeksi ekonomi 2025 untuk negara-negara berkembang tidak didapati perubahan dari proyeksi sebelumnya. Kendati demikian, risiko peningkatan kebijakan proteksionisme dan perang dagang, tensi geopolitik serta menurunnya volume perdagangan dunia, berpotensi untuk menurunkan angka pertumbuhan pada jangka pendek dan menengah.

Pada proyeksi inflasi dunia 2025, tidak terdapat banyak penyesuaian dan angka Inflasi diperkirakan akan terus menurun. Rata-rata inflasi global diperkirakan akan turun ke angka 4,2% (yoy) pada tahun 2025 dan berlanjut ke angka 3,6% (yoy) di tahun 2026. Kendati demikian, terdapat banyak potensi peningkatan risiko inflasi yang disebabkan oleh perkembangan geopolitik global. Sebagai contoh, potensi perang dagang dan peningkatan tarif cukai impor oleh AS, penguatan Dollar AS, potensi penurunan suku bunga yang lebih rendah oleh *The Fed* dan Bank Sentral lainnya untuk mengantisipasi peningkatan inflasi, serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah dan Ukraina.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan kinerja ekspor yang baik. Inflasi nasional pada tahun 2025 juga diproyeksikan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy). Angka tersebut dapat dicapai dengan dukungan konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Walaupun demikian, secara umum terdapat 5 (lima) tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia di tahun 2025, yaitu: I. Tingginya risiko geopolitik dan fragmentasi pola perdagangan dunia; II. Terjadinya pergeseran spasial pola pertumbuhan ekonomi dunia; III. Tingginya suku bunga dan risiko utang; IV. Berlanjutnya ketidakpastian dan perubahan pola investasi dunia; dan V. Cepatnya digitalisasi antarnegara dan meningkatnya risiko siber.

Perekonomian Aceh pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 3,8% - 4,2% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 sebesar 4,66% (yoy).

Perlambatan diperkirakan terjadi karena normalisasi belanja pemerintah pasca penyelenggaraan kegiatan besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), Pemilu, dan Pilkada pada tahun lalu. Kendati demikian, dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi akan turut didorong oleh peningkatan kinerja beberapa Lapangan Usaha (LU) strategis seperti LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Industri Pengolahan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, angka pertumbuhan perekonomian Aceh diperkirakan didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri.

Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh kuat. Hal ini turut didukung oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi sesuai pada target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada 2025 diperkirakan akan tetap tinggi, seiring dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Asta Cita. Kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan turut mendorong angka pertumbuhan khususnya pada LU Pertanian. Kendati demikian, konsumsi pemerintah diperkirakan tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan besar seperti Pemilu, PON, dan Pilkada yang turut mendorong angka realisasi belanja pemerintah.

Pertumbuhan PMTB/investasi pada tahun 2025 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Hal ini dikarenakan oleh selesainya seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh pada akhir tahun 2024, dan belum adanya pembangunan PSN baru di tahun 2025. Meski pertumbuhan PMTB lebih terbatas, terdapat dukungan dari aktivitas konstruksi pada sektor perumahan, jalan, maupun infrastruktur penunjang dalam skala yang lebih kecil.

Kinerja ekspor luar negeri secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan akan tetap tinggi, kendati

mengalami perlambatan dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya. Perlambatan terjadi karena faktor *base effect* tingginya angka pertumbuhan ekspor pada tahun 2024. Pertumbuhan angka ekspor diperkirakan masih tetap didorong dan didominasi oleh komoditas batubara dan kopi. Berdasarkan proyeksi harga komoditas dunia yang dirilis oleh Bank Dunia pada bulan Oktober 2024, harga batubara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 12% (yoy) pada tahun 2025 dan 2026. Harga kopi arabika setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024, diperkirakan akan termoderasi di tahun 2025 dan 2026 dengan penurunan harga sebesar -8,3% (yoy) dan -4,0% (yoy). Moderasi harga juga diperkirakan akan terjadi pada komoditas minyak sawit (CPO), yang diproyeksikan turun pada tahun 2025 dan 2026 sebesar -7,0%.

Dari sisi LU, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 utamanya didorong oleh kuatnya kinerja LU strategis seperti LU Pertanian, LU Perdagangan, serta LU Pertambangan. Secara umum, perkiraan kinerja positif pada LU Pertanian didukung oleh selesainya dan beroperasionalnya Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh yang akan membantu sistem irigasi pertanian Aceh dan meningkatkan produktivitas. LU Pertanian juga diperkirakan akan didorong oleh program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis, yang merupakan bagian dari Asta Cita.

Sementara itu, kinerja LU Perdagangan diperkirakan akan membaik, sejalan dengan daya beli masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini turut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi.

LU Pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi, kendati tidak setinggi angka pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pada LU Pertambangan turut didorong oleh tetap tingginya permintaan akan komoditas batubara, ditengah moderasi harga batubara dunia.

7.2. Prospek Inflasi

Berdasarkan prakiraan dari *The International Monetary Fund* (IMF), rata-rata angka inflasi global diperkirakan akan turun ke angka 4,2% (yoy) pada tahun 2025 dan berlanjut ke angka 3,5% (yoy) di tahun 2026. Angka tersebut masih berada di atas level pra-pandemi dengan kisaran 3,5% (yoy) pada tahun 2017-2019. Kendati demikian, masih terdapat risiko tekanan inflasi yang diakibatkan oleh perkembangan geopolitik global, seperti perang dagang dan menguatnya Dollar AS. Sementara itu, inflasi nasional diperkirakan akan kembali ke dalam rentang target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Secara keseluruhan tahun 2025, laju inflasi Aceh diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam range sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Dari sisi penawaran, program pembukaan lahan pertanian oleh pemerintah pusat diperkirakan mampu mendorong produksi pangan domestik. Hal ini didukung oleh prakiraan cuaca yang lebih baik dan selesainya pembangunan Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto yang diharapkan mampu meredam potensi bencana banjir di sentra produksi pangan. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/kPTS/SR.310/M.11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong penyerapan pupuk subsidi sehingga dapat meningkatkan produktivitas produksi komoditas pertanian. Ketiga hal tersebut diperkirakan dapat menjaga stabilitas inflasi khususnya inflasi *Volatile Food* pada tahun 2025.

Di sisi lain, kebijakan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 96 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan No 97 Tahun 2024 diperkirakan dapat mendorong inflasi. Selain itu, Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 diperkirakan juga berpengaruh terhadap gejolak inflasi *Administered Price* khususnya komoditas bensin pada tahun 2025. Walaupun demikian, prakiraan harga minyak dunia yang lebih rendah yang didorong oleh kebijakan ekspansif Amerika

Serikat dalam produksi energi fosil diperkirakan mampu menahan gejolak harga komoditas bensin pada tahun 2025. Selanjutnya, terdapat pula risiko kenaikan inflasi akibat berakhirnya kebijakan diskon tarif PAM pada Februari 2025.

Inflasi Aceh pada 2025 diperkirakan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2024. Walaupun demikian, berbagai program yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh seperti GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap stabil dan terkendali. Selanjutnya, strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus digalakkan dalam rangka mengendalikan inflasi agar tetap berada pada sasaran $2,5\% \pm 1\%$.

7.3. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kondisi ekonomi Aceh yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi

1. **Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha Industri Pengolahan.** Potensi pada sektor hulu yang dimiliki Aceh bisa dioptimalkan untuk mendorong sektor industri pengolahan sebagai sektor yang potensial karena, memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan *multiplier effect* yang besar. Pemetaan pohon industri dari masing-masing komoditas unggulan serta kajian teknis mengenai potensi dari tiap pohon industri mutlak dibutuhkan agar dapat diidentifikasi potensi dari masing-masing komoditas unggulan dalam penciptaan nilai tambah. Hal ini penting agar Aceh tidak kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa diciptakan melalui industri pengolahan.
2. **Mengurangi tingginya angka kemiskinan Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja** melalui langkah taktis replikasi *piloting*

pengembangan kelompok subsisten melalui sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan pemangku kebijakan terkait lainnya. Terdapat beberapa tahapan dalam usulan *piloting* tersebut, antara lain: (i) *Initial assessment*: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) dan Dinas Sosial (Dinsos) melakukan *initial assessment* terkait kelompok potensial yang akan dilakukan *piloting* pengembangan kelompok subsisten; (ii) *Implementing partner*: Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm), DPMG bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) identifikasi *implementing partner* yang potensial di Aceh (industri yang mampu menjadi *off-taker*) termasuk potensi pemanfaatan BUMG di gampong-gampong; (iii) Pendampingan: BI, OJK, Kemenkeu dan OPD teknis melakukan pembinaan teknis pengembangan usaha kepada kelompok subsisten terpilih dengan pemberdayaan ekonomi, perluasan akses, dan literasi keuangan, serta harmonisasi kebijakan; (iv) Pendampingan (lanjutan): fasilitasi promosi produk dari *implementing partner* daerah; (v) Monev: monitoring dan evaluasi pelaksanaan oleh seluruh pihak terkait; dan (vi) Replikasi: replikasi *success story* dapat dilakukan di kabupaten/kota lainnya.

3. **Mendorong pengembangan dan implementasi *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh.** *Green Economy* adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan, atau juga dapat diartikan sebagai aktivitas perekonomian yang sedikit atau tidak menghasilkan emisi gas-gas rumah kaca terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Adapun pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau mencakup penerapan *Good Agricultural Practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan, serta perikanan, pengembangan industri hilir dan

usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai nilai, dukungan kemitraan dan permodalan, optimalisasi komoditas dengan Indikasi Geografis, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan di Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala, dan karet.

4. **Mengakselerasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.** Sebagai daerah yang memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek, termasuk ekonomi, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Aceh cukup besar. Diperlukan perhatian khusus serta kolaborasi antar pemangku kebijakan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan ekonomi pesantren.
5. **Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan.** Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program Pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui upaya mendorong perbankan untuk lebih memprioritaskan pemberdayaan UMKM yang potensial dengan memperbesar porsi pembiayaan di tahun 2025.
6. **Mendorong model bisnis *sharing factory* dalam rangka mendorong UMKM dan Industri.** Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi *sharing factory* yang bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing. *Sharing factory* berpotensi membantu para pelaku UMKM yang tidak memiliki modal kerja tinggi untuk mengembangkan usahanya karena semua fasilitas dasar akan disediakan oleh pengelola sentra industri. Model *sharing factory* juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan mampu meningkatkan kualitas produk dan kapasitas

UMKM.

7. **Memperkuat peran Tim Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di setiap daerah** untuk mendukung ekosistem keuangan digital di Aceh. Transaksi non tunai/digital diharapkan dapat menjaga *demand* masyarakat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Transaksi non tunai/digital juga diperkirakan akan terus meningkat pasca pandemi sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah. Di lingkungan Pemerintah Daerah, Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) juga perlu diakselerasi melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perbankan, serta pihak terkait lainnya.
8. **Memperkuat peran Satgas percepatan investasi atau *Regional Investment Relations Unit (RIRU)* Aceh.** Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diperlukan keterlibatan investasi swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Dalam hal ini, peran Satgas percepatan investasi menjadi penting dan perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi proyek *clean and clear*, mengikuti *event* promosi investasi, memetakan calon investor potensial, serta memperkuat peran media dalam memperkenalkan proyek-proyek investasi kepada calon investor potensial.

Inflasi

Pada tahun 2025, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipatif yang bersifat struktural maupun *seasonal* untuk mengendalikan inflasi agar berada pada sasaran yang ditetapkan $2,5\% \pm 1\%$. TPID Aceh secara konsisten melakukan berbagai program pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi 4K, antara lain:

1. **Ketersediaan Pasokan** antara lain melalui aktivitas peningkatan produksi di daerah sentra dengan optimalisasi *Good Agriculture Practices*, replikasi *best practice*, dan hilirisasi pangan, penerapan *urban farming* dan pemanfaatan inovasi teknologi budidaya pertanian untuk peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, pemberian bantuan sarana prasarana di sisi hulu untuk mendukung peningkatan produksi dan menjaga pasokan, serta mengakselerasi program KAD untuk komoditas pangan strategis antara daerah sentra dan non sentra.
2. **Keterjangkauan Harga melalui stabilisasi harga pangan strategis yaitu,** dengan melanjutkan program sinergi operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan secara terjadwal dan serentak. Di samping itu, melaksanakan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk komoditas pangan yang bergejolak (*volatile food*).
3. **Kelancaran Distribusi melalui peningkatan konektivitas antar daerah.** Peningkatan konektivitas antar daerah untuk mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan diantaranya dilakukan melalui pemanfaatan tol laut, fasilitasi kerjasama UMKM pangan dengan *e-commerce*, dan optimalisasi pemanfaatan *cold storage* untuk komoditas perikanan.
4. **Komunikasi Efektif melalui peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah, peningkatan kapasitas dan koordinasi TPID se-Aceh, serta penguatan pengendalian ekspektasi inflasi.** Peningkatan akses informasi serta transparansi terkait harga antar daerah yakni, dengan pemanfaatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) sebagai referensi dalam rekomendasi kebijakan, Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan koordinasi dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengendalian inflasi Kab/Kota, pelaksanaan *High Level Meeting* TPID, dan pelaksanaan *Capacity Building* TPID. Terakhir, pengendalian ekspektasi inflasi dilakukan dengan bersinergi dengan media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.
5. **Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Aceh** secara garis besar terdiri dari program jangka pendek (*quick wins*) dan program jangka panjang (*long term*). Program *quick wins* berupa kerjasama antar daerah (KAD)

dan operasi pasar/pasar murah. Sementara itu, program *long-term* diarahkan untuk ketahanan pangan dalam bentuk pengembangan klaster pangan. Selain itu, terdapat program komunikasi dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) seperti belanja bijak berbelanja maupun himbauan pemanfaatan sumber pangan alternatif.

6. **Mewujudkan ketahanan pangan di Aceh** untuk menjadikan Aceh sebagai daerah produsen pertanian yang menerapkan pertanian berkelanjutan dengan penerapan ekonomi sirkular. Secara garis besar, terdapat empat program utama dalam mewujudkan hal tersebut, kemandirian pupuk di tingkat petani, kemandirian bibit di tingkat produsen, informasi *scheduling* tanam, dan penyimpanan. i) Kemandirian Pupuk (Petani) dilakukan melalui pengembangan pupuk organik mandiri untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (*self-sufficiency*). Dibutuhkan kapasitas, standarisasi dan legalitas yang cukup serta mumpuni untuk pengembangannya. Salah satu contoh implementasinya melalui pengembangan pupuk dengan dekomposer. ii) Kemandirian Bibit (Produsen bibit), bibit cabai merah keriting (CMK) yang dikenal dengan udeng atau odeng dan cabai merah varietas Bemeri adalah varietas cabai lokal unggul berasal dari Kab. Bener Meriah. Permasalahan yang muncul dalam proses pembibitan varietas lokal di atas adalah masih terbatasnya petani di Aceh yang membudidayakan varietas tersebut. Selain itu, kualitas bibit yang dibuat masih kurang baik. Masih perlu dilakukan pemuliaan tanaman agar konsistensi bibit yang dihasilkan sesuai standar dan berkualitas. Kementerian Pertanian dapat membantu proses pengembangan, proses sertifikasi, dan proses perizinan dari pemuliaan bibit lokal. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pasokan bibit dari luar daerah. Begitu pun untuk program kemandirian pupuk. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pupuk NPK yang mana bahan dasar ureanya sangat bergantung dari impor. iii) Informasi *scheduling*

tanam, dilakukan dengan menghubungkan info antara pedagang besar yang mengendalikan pasar dan pedagang pengepul di daerah pertanian yang menjadi pemasok komoditas tersebut. Selanjutnya, pedagang pengepul meneruskan info tersebut ke petani untuk dilakukan menyesuaikan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar. Terakhir, iv) penyimpanan, khususnya untuk komoditas pangan yang perlu didukung *cold supply chain*, yaitu suatu wadah untuk mempertahankan hasil panen komoditas pertanian. Penyimpanan cadangan pangan dapat digunakan untuk mempertahankan dan menyeimbangkan jumlah pasokan dan kebutuhan di pasar. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pasokan yang dapat dijual ke luar daerah sebagai bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD).

7. **Mendorong Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan Stabilisasi Suplai Gabah untuk Menjaga Inflasi Komoditas Beras.** Pasokan beras kerap kali didatangkan dari luar Aceh pada periode-periode tertentu. Padahal jika dihitung secara tahunan, produksi beras Aceh mengalami surplus. Gabah dari Aceh dijual ke Sumatera Utara untuk diolah, kemudian beras dijual kembali ke Aceh. Kondisi ini menyebabkan harga beras dapat meningkat/lebih tinggi daripada harga lokal. Beras lokal berpotensi untuk kalah saing dengan beras luar yang kualitasnya lebih baik dan berdampak pada berkurangnya pendapatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan hilirisasi produk tanaman pangan terutama padi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Lebih lanjut, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dapat dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan di Aceh. KAD dapat dilakukan dalam berbagai komoditas pangan mempertimbangan surplus dan defisit komoditas pangan di Aceh.

DAFTAR ISTILAH

Administered prices	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Inflasi inti	Inflasi inti adalah inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perceived risk	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Volatile food	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB

Agus Chusaini

KOORDINATOR PENYUSUN

Hendy Hadiyan

TIM PENULIS

Hafidz Yudhansyah

Imam Wahyudi

Muhammad Raziq Ilmi

Kristina Panduwinata

Hana Nabillah

Irfan Bagus Rachmanto

Hafidz Bramandito

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

JL. Cut Mutia No.15, Banda Aceh

Telp. (0651) 32320 ext. 8205 | Fax. (0651) 34116

Softcopy dapat diunduh pada tautan:

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Aceh-November-2024.aspx>.